



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201986026, 4 Desember 2019

Pencipta

Nama : **Sarmini, Warsono,**
Alamat : Mojopurno, Magetan, Jawa Timur, 30123
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **LPPM Unesa**
Alamat : Kampus Lidah Wetan, Surabaya, Jawa Timur, 60321
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Model Pembudayaan Empat Pilar Kebangsaan Untuk Membangun Nasionalisme Generasi Muda Menuju Generasi Indonesia 2025**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 31 Agustus 2019, di Surabaya

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000167875

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Sarmini	Mojopurno
2	Warsono	Lidah Wetan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi muncul akibat dari meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat secara multidimensional (Steger, 2003, p. 13). Kemajuan tersebut telah mempengaruhi di berbagai sektor yakni ekonomi, sosial, budaya, politik, teknologi, dan pendidikan yang telah mempengaruhi setiap level struktur sosial dalam realitas kehidupan sehari-hari.

Globalisasi merupakan tantangan bagi setiap negara. Hal ini berpengaruh tidak hanya di negara maju akan tetapi di negara berkembang (Christensen, 2018). Globalisasi telah memberikan imbas secara positif dan negatif. Beberapa keuntungan yang diakibatkan era globalisasi antara lain: (a) meningkatnya etos kerja yang tinggi; (b) kemajuan teknologi yang lebih produktif, efektif dan efisien; (c) tingkat kehidupan yang lebih baik; (d) kemajuan komunikasi, informasi, transportasi dan ilmu pengetahuan yang memberi kemudahan pada masyarakat, (e) meningkatkan turisme dan pariwisata, serta (f) meningkatkan pembangunan negara.

Dari berbagai akibat yang ditimbulkan dari globalisasi, efek negatif dari globalisasi pun sangat merugikan khususnya bagi Negara Indonesia, yaitu: (a) semakin mudahnya nilai budaya barat (westernisasi) yang masuk ke Indonesia; (b) lunturnya semangat solidaritas, gotong-royong, kepedulian dan kesetiakawanan; (c) kondisi industri dalam negeri sulit berkembang karena perusahaan

dalam negeri lebih bermitra dengan perusahaan asing; (d) menimbulkan kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri; (e) meningkatnya penyelundupan barang ilegal; (f) liberalisme (Steger, 2003, p. 104); (g) individualisme; (h) sekularisme; (i) konsumerisme, dan; (j) terjadinya kesenjangan sosial.

Upaya menghindari dan mencegah dari efek negatif globalisasi yang semakin berlarut, maka sangat diperlukan adanya penguatan jati diri ke-Indonesiaan yakni nasionalisme. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang lahir karena keanekaragaman dan perbedaan yang dipersatukan oleh kesadaran bersama untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Indonesia memiliki berbagai perbedaan dan keanekaragaman seperti budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, bahasa daerah, dan lain sebagainya (Nasikun, 2012, p. 35). Sejarah Indonesia telah membuktikan bahwa Indonesia selama beberapa tahun lamanya bisa mengatasi berbagai konflik yang timbul dari adanya keanekaragaman dengan damai, meskipun harus dilakukan dengan susah payah dan penuh pengorbanan. Keberagaman inilah yang menjadi identitas nasional bangsa Indonesia yang harus dipertahankan agar tidak luntur karena kemajuan zaman yang sangat pesat pada saat ini. Misalnya terjadinya kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang divonis dua tahun penjara. Karena negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sehingga tidak boleh adanya *blasphemy* (pelecehan agama). *Blasphemy* merupakan kejahatan atau kriminal yang diatur dalam UU. No. 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan Penodaan Agama.

Kemajuan zaman yang terjadi saat ini merupakan tantangan terbesar untuk mempertahankan keberagaman bangsa. Pemahaman generasi penerus bangsa telah terkontaminasi oleh kemajuan zaman. Globalisasi dan kecanggihan teknologi menjadi pintu masuknya nilai-nilai budaya luar yang dapat mengkontaminasi nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat semakin berkembang pesatnya gaya hidup kebarat-baratan (westernisasi) seperti mabuk-mabukan, clubbing, memakai pakaian ketat, pemakaian obat terlarang, dan perilaku menyimpang lainnya. Dengan kondisi seperti itu merupakan hal yang sangat memprihatinkan, karena jati diri dan kepribadian bangsa pada generasi penerus bangsa mulai terkikis dan terlupakan oleh adanya nilai-nilai budaya luar yang tidak sesuai dengan jati diri dan kepribadian bangsa.

Empat pilar merupakan Hal utama yang menjadi nilai dasar bagi tegaknya Republik Indonesia yaitu Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Generasi penerus bangsa telah banyak bergerak menjauh meninggalkan budaya ketimuran. Bahkan pemahaman generasi penerus bangsa dalam memahami empat pilar kebangsaan sangatlah rendah. Salah satu upaya menanamkan nilai empat kebangsaan pada generasi muda yaitu kepada siswa ialah melalui pendidikan karakter kebangsaan.

Penanaman empat pilar kepada siswa sangat penting tujuannya agar siswa mengetahui identitas negaranya sehingga memiliki rasa cinta tanah air dan menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif dan bertanggung jawab. Nilai-nilai yang terkandung dalam

empat pilar ini harus menjadi prioritas dalam membekali aspek kognitif, afektif dan psikomotorik siswa. Empat pilar kebangsaan merupakan wahana bagi pembentukan generasi penerus kepemimpinan bangsa yang mampu meneruskan dan menerapkan langkah-langkah strategis dalam menanamkan karakter luhur, maka karakter luhur itulah yang menjadi jati diri bangsa dalam proses pendidikan yang selama ini dijalani, dengan demikian tercipta generasi muda, para pelajar yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai penerus bangsa di masa mendatang. Namun belakangan pengaruh globalisasi telah mengurangi dan menghilangkan kepedulian siswa terhadap identitas negara Indonesia. Oleh karena itu, penting kiranya apabila generasi penerus bangsa utamanya siswa mengetahui, memahami dan memaknai empat pilar kebangsaan tersebut ke dalam kehidupan mereka sehari-hari.

B. Tujuan Penulisan Buku

Tujuan penulisan buku ini bisa terurai dalam tujuan umum dan tujuan khusus, yakni sebagai berikut.

1. Tujuan Khusus
 - a. Untuk mengidentifikasi dan menghasilkan informasi dalam menyusun deskripsi tentang model pendekatan empat pilar kebangsaan untuk membangun nasionalisme generasi muda.
 - b. Untuk memperoleh gambaran mengenai model pendekatan empat pilar kebangsaan dalam sekolah.
 - c. Mengajak semua pihak sekolah untuk mengenal apa yang sebenarnya dimaksud dengan model pendekatan empat pilar.

- d. Mendorong mereka untuk melihat model pendekatan empat pilar sebagai suatu alternatif yang menarik dalam membangun nasionalisme pada generasi muda.
- e. Membantu mereka untuk melaksanakan kegiatan sekolah secara efektif dan efisien dengan model empat pilar untuk meningkatkan nasionalisme.
- f. Untuk memberi alternatif panduan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan sekolah terkait dengan pembudayaan empat pilar kebangsaan melalui kegiatan belajar mengajar (intrakurikuler), kegiatan ekstrakurikuler, budaya sekolah dan peran serta masyarakat.
- g. Melengkapi bahan pustaka sebagai penunjang bahan pustaka di sekolah.
- h. Membantu meningkatkan profesionalisme pihak sekolah dengan menerapkan dan mengembangkan berbagai model pendekatan empat pilar, menambah wawasan dengan bahan-bahan pustaka dan mendiskusikan dengan teman-teman seprofesi.

2. Tujuan Umum

- a. Mengembangkan Grand Design dari pembudayaan empat pilar kebangsaan yang akan menjadi rujukan konseptual dan operasional pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian pada setiap jalur dan jenjang pendidikan;
- b. Melaksanakan Pembudayaan empat pilar secara nasional, sistemik, dan berkelanjutan.

C. Visi dan Misi Tingkat Satuan Pendidikan SMP di Sidoarjo

Visi misi merupakan gagasan yang hendak dicapai oleh suatu program. Visi misi menjadi target dan tuntutan yang harus dicapai melalui tahapan-tahapan yang telah dicanangkan dalam sebuah organisasi.

1. Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo

a. Visi

Visi dalam hal ini adalah visi Bupati Sidoarjo dan Wakil Bupati Sidoarjo. Visi pemeritahan

Kabupaten Sidoarjo pada dasarnya merupakan gambaran masa depan yang akan diwujudkan oleh

pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam periode 2016-2021 fungsi visi pemerintah Kabupaten Sidoarjo, terutama sebagai arah bagi perjalanan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Visi bukan mimpi dan bukan slogan tetapi visi harus diwujudkan dan dapat diarahkan ketercapaiannya.

Berdasarkan masalah potensi dan harapan masa depan maka pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam periode 2016-2021 menetapkan visi yaitu: ***“Mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera & Berkelanjutan”***. Dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :



1) **Mandiri**

Kemandirian dalam hal ini meliputi 2 (dua) sisi yaitu pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan masyarakat. Oleh karena itu ketercapaian kemandirian dapat dilihat dari adanya peningkatan kemampuan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah.

2) **Sejahtera**

Dari uraian tersebut di atas, maka ketercapaian visi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Makin kuatnya kelembagaan pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo.
- b) Makin meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan.
- c) Makin baiknya kebijakan-kebijakan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- d) Makin baiknya kualitas pembangunan di wilayah.
- e) Makin meningkatnya kesejahteraan kehidupan dari masyarakat

b. **Misi**

Misi dalam hal ini adalah misi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Misi pada dasarnya merupakan penjabaran atau operasionalisasi dari visi. Misi merupakan bidang-bidang yang akan diarahkan untuk menuju tercapainya visi yang telah ditetapkan. Misi juga berupa output. output yang pernah diciptakan terlebih dahulu untuk mewujudkan visi. Misi pada

dasarnya merupakan beban yang akan dipikul dan diselesaikan agar visi dapat terwujud.

Untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana rumusan di muka, maka dirumuskan misi (beban kinerja yang harus dilaksanakan) sebagai berikut :

1) Pemerintah yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintah yang inovatif, aspiratif, partisipatif dan transparan;

Tujuan pemerintah secara garis besar ada 2 (dua) hal yaitu:

a) Meningkatkan tata kelola dan pelayanan publik pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang baik, dengan sasaran:

(1) Meningkatnya tata kelola pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang baik;

(2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif dan merata.

b) Mewujudkan tata kelola pemerintah desa yang baik, dengan sasaran: Terwujudnya tata kelola pemerintah desa yang baik.

2) Meningkatkan Perekonomian Daerah melalui optimalisasi potensi Basis Industri Pengolahan, Pertanian, Perikanan, Pariwisata, UMKM dan Koperasi serta Pemberdayaan Masyarakat;

Tujuan pemerintah secara garis besar ada 6 (enam) hal yaitu:

a) Meningkatkan kapasitas fiskal daerah, dengan sasaran: Meningkatnya kapasitas fiskal daerah berbasis pada sumber-sumber penerimaan daerah yang fundamental;

- b) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, dengan sasaran:
 - (1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif;
 - (2) Meningkatnya kontribusi sektor potensial;
 - (3) Meningkatnya kontribusi sektor primer;
 - (4) berkembangnya sektor pariwisata yang terintegrasi dengan industri kreatif.
 - c) Meningkatkan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Sidoarjo, dengan sasaran: Meningkatnya iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Sidoarjo.
 - d) Meningkatkan jumlah lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran, dengan sasaran: Meningkatnya jumlah lapangan dan berkurangnya tingkat pengangguran.
 - e) Peningkatan ketahanan pangan Kabupaten Sidoarjo, dengan sasaran: Meningkatnya ketersediaan dan mutu pangan daerah.
 - f) Meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat dan pemberdayaan perempuan, dengan sasaran:
 - (1) Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi;
 - (2) Meningkatnya peran perempuan dalam perekonomian, pembangunan dan pemberdayaan.
- 3) Meningkatnya kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;

Tujuan pemerintah secara garis besar ada 2 (dua) hal yaitu:

- a) Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata, dengan sasaran:
 - (1) Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing;
 - (2) Terwujudnya pendidikan yang merata.
 - b) Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata, dengan sasaran: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang merata.
- 4) Meningkatnya tatanan Kehidupan Masyarakat yang berbudaya dan berakhlakul Karimah kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan Ketertiban;

Tujuan pemerintah secara garis besar ada 2 (dua) hal yaitu:

- a) Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram, dengan sasaran:
 - (1) Meningkatnya ketertiban ketentraman dan harmoni sosial dalam masyarakat;
 - (2) Menurunnya berbagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat;
 - (3) Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menunjang supremasi hukum dan demokrasi.
- b) Meningkatkan peran budaya lokal dan peran pemuda dalam pembangunan, dengan sasaran:

- (1) Meningkatnya peran budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari proses pembangunan;
 - (2) Meningkatnya prestasi dan peran serta pemuda dalam pembangunan.
- 5) Infrastruktur Publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Tujuan pemerintah secara garis besar ada 2 (dua) hal yaitu:

- a) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik yang memacu dan memicu kegiatan perekonomian, dengan sasaran:
 - (1) Meningkatnya kuantitas infrastruktur dasar (perhubungan, irigasi, banjir) sesuai arahan kebijakan tata ruang;
 - (2) Terwujudnya lingkungan permukiman yang aman dan sehat.
- b) Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat: Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat;

Dana bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo merupakan elemen yang mutlak harus ada. Visi dan Misi tidak akan terwujud tanpa tersedianya dana. Oleh karena itu pemerintahan yang kuat ditandai oleh cukup dan beragamnya sumber-sumber dana yang dimilikinya.

Dari uraian tersebut di atas, maka pencapaian misi Bupati dan Wakil Bupati dapat diindikasikan sebagai berikut :

1. Terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan secara efektif.
2. Tersusunnya program-program pembangunan secara efektif dan efisien.



Gambar 1.2
Dinas Kabupaten Sidoarjo
Sumber: google.com

3. Penggunaan dana yang makin terarah dan efisien/ benar.
4. Terlaksananya pengawasan melekat yang efektif.
5. Meningkatnya jumlah dan keragaman sumber-sumber pendanaan desa.
6. Meningkatnya kemandirian masyarakat, terutama dalam bidang pendanaan pembangunan.
7. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
8. Meningkatnya kemampuan masyarakat mengakses ke sumber-sumber daya termasuk informasi.

9. Meningkatnya usaha kemitraan yang dilakukan oleh masyarakat.
10. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat.
11. Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat.
12. Berkembangnya produktivitas sektor pertanian dan sektor sektor riil ekonomi.

2. Visi Misi Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo memulai langkahnya dengan membenahi visi dan misi agar tidak hanya mentereng dari sisi konsep melainkan dapat diaplikasikan secara nyata, sehingga bisa mencapai tujuan dengan optimal. Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo adalah “Meningkatkan mutu pendidikan untuk meningkatkan kesempatan belajar dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun”. Dengan visi tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo meyakini bahwa pendidikan akan memberikan pengaruh positif kepada pelaksanaan pembangunan sektor lain seperti ekonomi dan pembangunan. Sekalipun bukan secara langsung memberi peluang dan kesempatan untuk bekerja, akan tetapi dunia pendidikan telah membekali dengan berbagai hal guna mewujudkan tujuan akhir tersebut.

Tujuan dari visi tersebut antara lain ialah untuk meningkatkan peran serta tanggung jawab masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Selain itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo mengharapkan agar visi tersebut memberikan rangsangan terhadap penyelenggaraan pendidikan dari tingkat dasar hingga tingkat menengah bahkan sekolah tinggi.

Ada beberapa misi yang akan dilakukan dan sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Upaya-upaya itu antara lain dengan membenahi infrastruktur. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa tujuan pendidikan akan tercapai dengan optimal manakala proses belajar mengajar bisa terlaksana secara optimal sesuai dengan garis-garis besar yang telah ditetapkan. Dan proses belajar mengajar itu akan terselenggara dengan baik manakala memiliki ruang belajar yang nyaman, sehingga seluruh peserta didik dapat mengikuti pelajaran tanpa perasaan was-was. Langkah itulah yang kemudian ditempuh oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dalam mewujudkan visi dan misinya.¹



*Gambar 1.3 Siswa SMP
Sumber: google.com*

3. Visi Misi Tingkat Satuan Pendidikan SMP

Begitu pula yang tergambar dalam visi dan misi dunia pendidikan di Sidoarjo. Visi dari tingkat satuan pendidikan SMP di Sidoarjo ialah *“Terwujudnya warga sekolah yang berakhlak mulia, berbudaya, berprestasi,*

¹ <http://www.anneahira.com/dinas-pendidikan-kabupaten-sidoarjo.htm>

dan berwawasan lingkungan”. Sedangkan misi yang diusung antara lain:

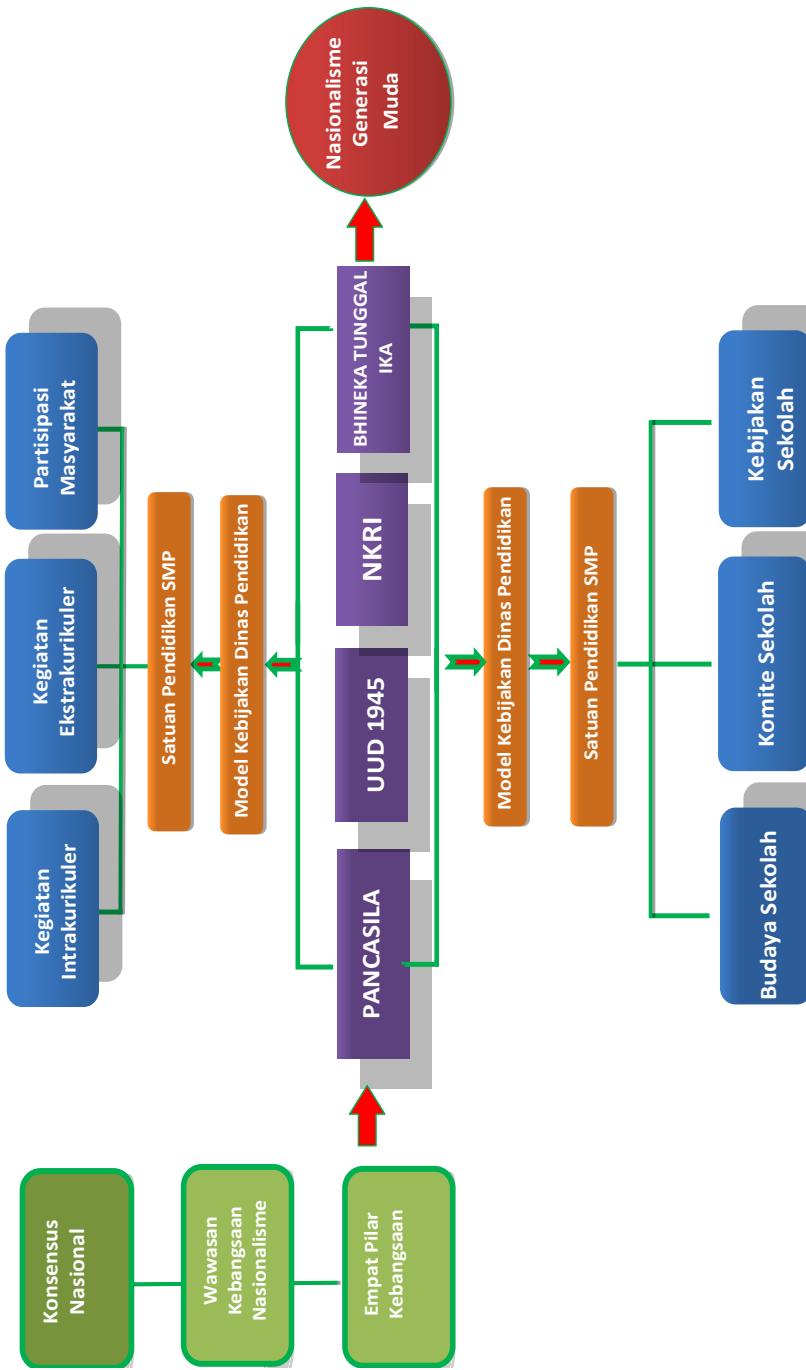
1. Mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi sekolah
2. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Meningkatkan kemampuan warga sekolah dalam IPTEK dan berbahasa Inggris.
4. Mengembangkan potensi siswa yang kreatif, inovatif, berkualitas, dan berakhlak mulia
5. Terwujudnya lingkungan sekolah yang bersih, rapi, dan indah.
6. Tercapainya akuntabilitas dan transparansi program kegiatan untuk menuju sekolah standar internasional.
7. Mengembangkan fasilitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan.
8. Mengembangkan standar penilaian.
9. Menanamkan kepedulian sosial dan semangat kebangsaan.
10. Terciptanya budaya disiplin.
11. Mengembangkan jiwa cinta alam dan pelestarian lingkungan hidup.
12. Menciptakan pribadi yang peduli kesehatan dan lingkungan.
13. Meningkatkan peran serta warga sekolah, orang tua siswa dan pemerintah dalam pengembangan pengelolaan sekolah yang ramah lingkungan.

Sejalan dengan visi misi di atas maka penerapan empat pilar kebangsaan tentunya juga memiliki garis yang sejalan dengan visi misi yang dicantumkan dalam satuan pendidikan SMP di Sidoarjo. Visi misi satuan

pendidikan di Sidoarjo sangat mendukung pelaksanaan dan pengamalan empat pilar kebangsaan di dalam masyarakat, khususnya para pelajar dan generasi muda.

D. *Grand Designs* Empat Pilar Kebangsaan pada Tingkat Satuan Pendidikan SMP di Sidoarjo

Pembudayaan empat pilar kebangsaan pada tingkat satuan pendidikan di susun dalam sebuah kebijakan pembudayaan empat pilar kebangsaan yang dapat digunakan untuk membangun nasionalisme. Pembudayaan empat pilar kebangsaan tersebut dapat terangkum dalam sebuah *Grand Designs* empat pilar kebangsaan, diantaranya adalah:



Gambar 1.4
Grand Desain Pembudayaan Empat Pilar Kebangsaan

1. Pembudayaan Dalam Kegiatan Intrakurikuler

a. Pengertian Kegiatan Intrakurikuler

Kegiatan intrakurikuler ialah kegiatan belajar-mengajar yang dilakukan di sekolah sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kegiatan Intrakurikuler merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah dengan teratur, jelas, terjadwal dan sistematis yang merupakan program utama dalam proses mendidik siswa. Kegiatan ini berguna untuk mencapai tujuan masing-masing mata pelajaran. Jadwal kegiatan disusun sedemikian rupa sesuai tujuan masing-masing pembelajaran. Kegiatan Intrakurikuler juga diartikan sebagai kegiatan utama persekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Kegiatan ini dilakukan guru dan peserta didik dalam jam-jam pelajaran setiap hari. Kegiatan intrakurikuler ini dilakukan untuk mencapai tujuan minimal setiap mata pelajaran/bidang studi yang tergolong inti maupun khusus.

b. Jenis-Jenis Program Intrakurikuler

Program intrakurikuler berdasarkan pembagian bidang studi sebagai berikut.

- 1) Bidang studi inti:
 - a) Bahasa Indonesia
 - b) Matematika (*Mathematic*)
 - c) Ilmu Pengetahuan Alam/IPA (*Science*)
 - d) Ilmu Pengetahuan Sosial/IPS (*Social studies*)
 - e) Pendidikan Kewarganegaraan



Gambar 1.5 Kegiatan Siswa Intrakurikuler
 Sumber: google.com

- f) Physical Education
- g) Pendidikan Agama Islam/PAI (Islamic Studies)
- h) Pendidikan Jasmani dan Kesehatan/Penjaskes (Health Education)
- i) Seni (Art & Craft)
- j) Musik (Music), dst.
- 2) Bidang studi tambahan:
 - a) Bahasa Inggris (*English*)
 - b) IT, dst.
- 3) Muatan lokal:
 - a) *Class Time*
 - b) *Reciting Quran*
 - c) *Literacy*
 - d) *Girls Talk/Boys Talk*
 - e) Budaya Daerah, dst.

c. **Langkah-langkah Pembudayaan Empat Pilar dalam Kegiatan Intrakurikuler**

Kegiatan intrakurikuler atau proses belajar-mengajar di kelas merupakan kegiatan utama sekolah. Sekolah diberi kebebasan memilih strategi, metode, dan teknik-teknik pembelajaran dan pengajaran yang efektif, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, siswa, guru, dan kondisi nyata sumber daya yang tersedia di sekolah. Tujuan proses pembelajaran adalah membentuk kreasi lingkungan yang dapat membentuk dan mengubah struktur kognitif peserta didik, berhubungan dengan tipe pengetahuan yang harus dipelajari dan harus melibatkan peran lingkungan sosial.

Saat ini strategi pengajaran dan pembelajaran mulai digagas ke arah pembelajaran yang berpusat pada siswa (*Student Center*). *Student Center* merupakan pembelajaran yang menekankan pada keaktifan belajar siswa, bukan pada keaktifan mengajar guru. Oleh karena itu, cara-cara belajar siswa aktif seperti *active learning*, *cooperative learning*, dan *quantum learning* perlu diterapkan. Dalam proses belajar-mengajar terdapat dua masalah yang turut menentukan berhasil tidaknya suatu proses belajar-mengajar, yaitu masalah pengajaran (*intructional problem*) dan masalah manajemen kelas (*classroom management*). Antara keduanya diyakini mempunyai implikasi dalam pencapaian hasil belajar.

Pengajaran dan manajemen kelas adalah dua kegiatan yang saling terkait, namun dapat dibedakan satu sama lain sebab keduanya mempunyai tujuan yang berbeda. Kalau pengajaran mencakup semua kegiatan

yang secara langsung dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan khusus pengajaran (menentukan *entry behaviour* siswa, menyusun rencana pelajaran, memberikan informasi, bertanya, menilai, dan sebagainya), maka manajemen kelas merujuk pada kegiatan-kegiatan yang menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar (pembinaan raport, penghentian tingkah laku siswa yang menyelewengkan perhatian kelas, pemberian ganjaran bagi siswa yang tepat waktu mengerjakan tugas, penetapan norma kelompok yang produktif, dan sebagainya).

Pembudayaan empat pilar ke dalam kegiatan intrakurikuler bisa dimasukkan ke dalam pembelajaran di kelas pada setiap mata pelajaran. Pelajaran PKn dan IPS merupakan dua mata pelajaran yang memuat materi khusus mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Namun jiwa, nilai yang termuat dalam empat pilar kebangsaan bisa diselipkan dalam semua mata pelajaran dan terangkum dalam sebuah kegiatan belajar mengajar. Bagi guru, nilai-nilai empat pilar kebangsaan ini dapat diintegrasikan dalam sebuah RPP. RPP yang disusun hendaknya bisa menanamkan nilai-nilai empat pilar kebangsaan sehingga pengimplementasian nilai-nilai tersebut lebih optimal.

2. Pembudayaan dalam Kegiatan Ekstrakurikuler

a. Pengertian Kegiatan Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan siswa sekolah atau universitas di luar jam belajar kurikulum standar. Kegiatan-kegiatan ini ada

pada setiap jenjang pendidikan dari sekolah dasar sampai universitas. Kegiatan ekstrakurikuler ditujukan agar siswa dapat mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik. Kegiatan ini diadakan secara swadaya dari pihak sekolah ataupun siswa-siswi itu sendiri untuk merintis kegiatan di luar jam pelajaran sekolah. Kegiatan dari ekstrakurikuler ini sendiri dapat berbentuk kegiatan pada seni, olahraga, pengembangan kepribadian, dan kegiatan lain yang bertujuan positif untuk kemajuan dari siswa-siswi itu sendiri.

b. Fungsi Kegiatan Ektrakurikuler

Menurut kajian Anifral Hendri, mengenai fungsi kegiatan ekstrakurikuler adalah sebagai berikut.

- a. Pengembangan, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas peserta didik sesuai dengan potensi, bakat, dan minat mereka.
- b. Sosial, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik.
- c. Rekreatif, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan suasana rileks, mengembirakan, dan menyenangkan bagi peserta didik yang menunjang proses perkembangan.
- d. Persiapan karier, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kesiapan karier peserta didik.

c. Jenis-Jenis Kegiatan Ektrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dengan memperhatikan minat dan bakat siswa, serta kondisi lingkungan dan sosial budaya. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler ditangani oleh guru atau petugas lain yang ditunjuk. Kegiatan ekstrakurikuler bisa diisi dengan kegiatan olahraga seperti bola basket, bola voli, pencak silat dan lainnya yang disesuaikan dengan minat dan bakat siswa. Bagitupula dengan dibidang-bidang lain, seperti bidang seni bisa diisi dengan drama, lukis, tari, dst. Keseluruhan bidang ditujukan sebagai wahana untuk mempeluas wawasan serta membangun nilai dan sikap positif siswa.

Contoh Kegiatan Ekstra Kurikuler antara lain sebagai berikut.

- a) Paskibra/Pasukan Pengibar Bendera
- b) PKS/Patrolis Keamanan Sekolah
- c) PMR/Palang Merah Remaja
- d) Organisasi Islam/IRMUS (Ikatan Remaja Sekolah)
- e) Majalah Dinding
- f) Olahraga Prestasi :
 - (1) Volley Ball
 - (2) Basket
 - (3) Key Shin Khan/Senam
 - (4) Futsal
- g) Teater Qubba
- h) Sanggar Seni
- i) NEC (*Nine English Club*)
- j) KIR Matematika
- k) KIR (Karya Ilmiah Remaja) IPA, dan seterusnya.

d. Langkah-langkah Pembudayaan Empat Pilar dalam Kegiatan Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler berfungsi membantu mengembangkan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat. Melalui ekstrakurikuler, peserta didik dapat memantapkan pengembangan kepribadian siswa yang cenderung berkembang untuk memilih jalan tertentu. Kepribadian seseorang menunjukkan apa yang ingin diperbuat bilamana ia dalam keadaan senang dan ditempatkan pada situasi tertentu. Kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan sebagai kegiatan yang diarahkan untuk memperluas pengetahuan siswa, mengembangkan nilai-nilai atau sikap dan menerapkan secara lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajari siswa dalam mata pelajaran program inti dan pilihan. Walaupun sama-sama dilaksanakan diluar jam pelajaran kelas, kegiatan ekstrakurikuler lebih menekankan pada kegiatan kelompok.

Pembudayaan empat pilar kebangsaan bisa juga diintegrasikan ke dalam kegiatan ekstrakurikuler untuk membangun rasa nasionalisme siswa. Secara khusus para pembina kegiatan ekstrakurikuler bisa merancang kegiatannya menjadi sebuah kegiatan yang memuat nilai-nilai empat pilar kebangsaan. Misal: kegiatan ekstrakurikuler pramuka bisa merancang kegiatan outbond untuk menanamkan rasa cinta tanah air, persatuan, kerjasama, gotong-royong, rela berkorban dan nilai-nilai lainnya. Kegiatan PMR juga bisa melakukan kegiatan donor darah/membantu musibah dengan tujuan menanamkan nilai kemanusiaan, rela berkorban dan beragam kegiatan

lainnya. Pembudayaan nilai-nilai empat pilar ini harus terencana kegiatannya dan terukur hasilnya.

3. Pembudayaan Dalam Budaya Sekolah

a. Pengertian Budaya Sekolah

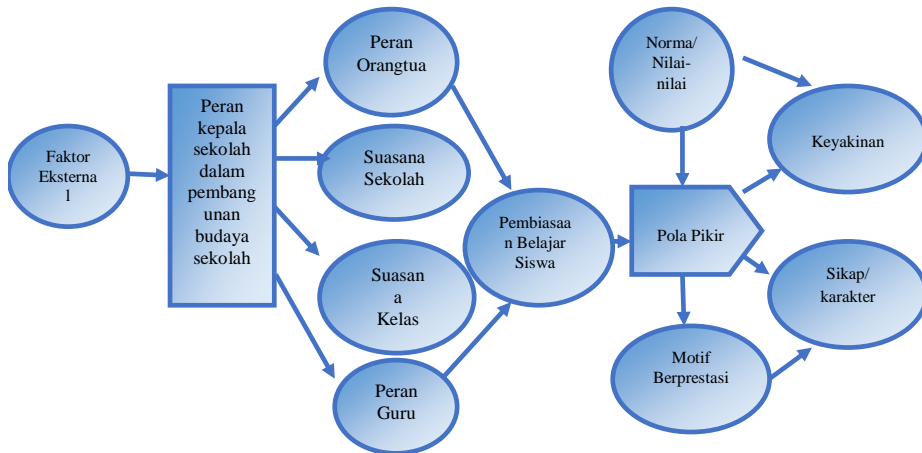
Budaya sekolah menurut Waller (Peterson and Deal, 2009, p. 8) menyatakan bahwa setiap sekolah mempunyai budayanya sendiri, yang berupa serangkaian nilai, norma, aturan moral, dan kebiasaan, yang telah membentuk perilaku dan hubungan-hubungan yang terjadi didalamnya. Sementara itu, Short dan Greer (1997) mendefinisikan budaya sekolah sebagai keyakinan, kebijakan, norma, dan kebiasaan di dalam sekolah yang dapat dibentuk, diperkuat, dan dipelihara melalui pimpinan dan guru di sekolah. Budaya sekolah, merupakan konteks di belakang layar sekolah yang menunjukkan keyakinan, nilai, norma, dan kebiasaan yang telah dibangun dalam waktu yang lama oleh semua warga dalam kerja sama di sekolah. Budaya sekolah berpengaruh tidak hanya pada kegiatan warga sekolah, tetapi juga motivasi dan semangatnya.

Stolp dan Smith (1994) menyatakan bahwa budaya sekolah berkembang bersamaan dengan sejarah sekolah. Budaya sekolah yang dikembangkan berwujud norma, nilai-nilai, keyakinan, tata upacara, ritual, tradisi dan mitos yang dipahami oleh seluruh warga sekolah. Adanya perbedaan tingkat keyakinan, norma, dan nilai-nilai yang diyakini oleh warga sekolah menyebabkan sekolah memiliki tradisi yang berbeda-beda.

b. Langkah-langkah Pembudayaan Empat Pilar dalam Budaya Sekolah

Pembudayaan empat pilar kebangsaan yang ketiga dilakukan melalui pengembangan budaya sekolah. Tujuan pengembangan budaya empat pilar kebangsaan di sekolah yaitu dengan membangun suasana sekolah yang kondusif, melalui pengembangan komunikasi dan interaksi yang sehat antara kepala sekolah dengan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah. Sedangkan manfaat yang bisa diambil dari upaya pengembangan budaya empat pilar kebangsaan di sekolah, diantaranya: (1) Menjamin terlaksananya pelaksanaan empat pilar dengan baik; (2) Membuka seluruh jaringan komunikasi dari segala jenis dan level baik komunikasi vertikal maupun horizontal; (3) Lebih terbuka dan transparan; (4) Menciptakan kebersamaan dan rasa saling memiliki yang tinggi; (5) meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan; (6) jika menemukan kesalahan akan segera dapat diperbaiki; dan (7) dapat beradaptasi dengan baik terhadap perkembangan IPTEK.

Pengembangan Budaya sekolah bisa disusun dalam sebuah kerangka pengembangan budaya sekolah. Dalam kerangka tersebut akan terlihat jelas hubungan antar unsur dalam peran kepala sekolah terhadap penguatan budaya sekolah dan dapat dilihat gambar 1.6 sebagai berikut:



Gambar 1.6
Diagram Pengembangan Budaya Sekolah

Berdasarkan Gambar 1.6 dapat dicermati bahwa pembiasaan belajar siswa dapat dibangun dari peranan kepala sekolah melalui pembangunan budaya sekolah. Peran kepala sekolah dalam pembangunan budaya sekolah sangat dipengaruhi oleh dari peran orang tua siswa, suasana sekolah, suasana kelas, dan peran guru. Keseluruhan faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi pembiasaan belajar siswa, yaitu norma atau nilai-nilai, pola pikir, dan motif berprestasi. Keterpaduan antara norma/nilai-nilai dengan pola pikir akan menghasilkan keyakinan siswa. Sedangkan keterpaduan antara pola pikir dengan motif berprestasi akan menghasilkan sikap/karakter siswa.

Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional (2011) dalam kaitan pengembangan budaya sekolah yang dilaksanakan dalam kaitan pengembangan diri, menyarankan empat hal yang meliputi:

1) Kegiatan Rutin

Merupakan kegiatan yang dilaksanakan peserta didik secara terus-menerus dan konsisten setiap saat. Misalnya upacara bendera setiap hari senin.

2) Kegiatan Spontan

Merupakan kegiatan yang bersifat spontan, saat itu juga, pada waktu terjadi keadaan tertentu, misalnya mengumpulkan sumbangan bagi korban bencana alam.

3) Keteladanan

Timbulnya sikap dan perilaku peserta didik karena meniru perilaku dan sikap guru dan tenaga kependidikan di sekolah, bahkan perilaku seluruh warga sekolah yang dewasa lainnya sebagai model, termasuk misalnya petugas kantin, satpam sekolah, penjaga sekolah dan sebagainya. Dalam hal ini akan dicontoh oleh siswa misalnya kebiasaan para warga sekolah untuk disiplin.

4) Pengondisian

Penciptaan kondisi yang mendukung keterlaksanaan pengembangan empat pilar kebangsaan.

Pembudayaan empat pilar kebangsaan dalam budaya sekolah menjadi sumber nilai karakter yang harus diberikan di sekolah. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa bisa diidentifikasi dari sumber-sumber berikut ini:

a) Agama

Masyarakat Indonesia mendasari kehidupannya pada nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran dalam sebuah agama.

b) Pancasila

Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni. Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara.

c) Budaya

Nilai-nilai budaya dapat dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat.

d) Tujuan Pendidikan Nasional

Tujuan pendidikan Nasional adalah sumber yang paling operasional dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa.

Dari keempat sumber karakter nilai yang bisa diberikan di atas, maka Pancasila sebagai pilar pertama menjadi salah satu acuan untuk menanamkan nilai

pendidikan karakter bagi peserta didik. Untuk menanamkan dan membudayakan empat pilar kebangsaan tersebut, maka tiga aspek budaya sekolah menjadi pilihan terbaik, yaitu meliputi:

- (1) Budaya Akademik, misal terdiri dari gemar membaca, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, disiplin, kerja keras, kreatif dan mandiri.
- (2) Budaya demokratis, misal terdiri dari dekmokratis, toleransi, semangat kebangsaan, dan cinta tanah air.
- (3) Budaya Sosial, misal terdiri dari religius, bersahabat, cinta damai, peduli sosial, peduli lingkungan, tanggung jawab dan jujur.

Berikut berbagai contoh bentuk kegiatan yang bisa dilakukan oleh sekolah untuk mengintegrasikan empat pilar kebangsaan ke dalam budaya sekolah:

a. Budaya Keagamaan (Religi)

Tujuan	: Menanamkan perilaku atau tatakrama dalam pengamalan nilai-nilai agama sehingga terbentuk kepribadian dan sikap yang baik (<i>akhlakul karimah</i>) serta disiplin dalam berbagai hal.
Bentuk Kegiatan	: Budaya salam, Do'a sebelum/sesudah belajar, Do'a bersama menyambut UN/US, Tadarus dan kebaktian, Sholat Dzuhur Berjamaah, Lima Hari Belajar, LOKETA (Lomba Keterampilan Agama), Studi Amaliah Ramadhan, RETRET, Hafalan Juz Amma, Budaya Bersih;

Konferensi kasus, Kegiatan Praktek Ibadah, Buka Puasa Bersama, Pengelolaan ZIS, PHBI

b. Budaya Kerjasama (*Team Work*)

Tujuan : Menanamkan rasa kebersamaan dan rasa sosial melalui kegiatan bersama.

Bentuk Kegiatan : MOS, Kunjungan Industri, Parents Day, Baksos, Teman Asuh, Sport And Art, Kunjungan Museum, Pentas Seni, Studi banding, Ekskul, Labs Channel, Labs TV, Labs Care, Pelepasan Siswa, Seragam Sekolah, Majalah Sekolah, Potency Mapping, Buku Tahunan, PHBN, PORSENI.

c. Budaya Kepemimpinan (*Leadership*)

Tujuan : Menanamkan jiwa kepemimpinan dan keteladanan dari sejak dini

Bentuk Kegiatan : *Career Day*; budaya kerja keras, cerdas dan ikhlas, budaya Kreatif; Mandiri & bertanggung jawab, Budaya disiplin/TPDS, SAKSI, Lintas juang OSIS, Ceramah Umum, upacara bendera, Olah Raga Jumat Pagi, Studi Kepemimpinan Siswa, LKMS, OSIS

4. **Pembudayaan Dalam Peran Serta Masyarakat**

Peran masyarakat dalam pembangunan pada umumnya dimulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil, dan evaluasi kegiatan (Cohen and Uphoff, 1980). Secara lebih rinci, peran dalam pembangunan berarti mengambil bagian atau peran dalam pembangunan, baik dalam bentuk pernyataan mengikuti kegiatan, memberi masukan berupa pemikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, dana atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasilnya (Sahidu, 1998).

Selain lingkungan keluarga dan lembaga pendidikan, perkembangan kepribadian anak juga dipengaruhi oleh masyarakat. Masyarakat merupakan sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Keberadaan masyarakat yang menghargai ajaran Islam, turut memberikan kontribusi bagi anak dalam memahami makna hidup, mempraktekkan ajaran Islam, rajin beramal, cinta damai, suka menyambung ukhuwah islamiyah. Jika nilai-nilai Islam melekat pada budaya masyarakat, tentunya secara tidak langsung akan dapat mendorong pembentukan karakter Islami pada diri seorang anak.

Peran masyarakat dalam pembudayaan empat pilar kebangsaan dapat diklasifikasikan dalam dua hal: 1). Peran melalui keberadaan masyarakat yang berjalan secara alamiah dan terbuka, 2). Peran masyarakat yang terlembagakan dalam organisasi-organisasi sosial. Intinya orang tua, lembaga pendidikan, dan masyarakat harus bersinergi dalam menanamkan empat pilar bagi anak-anak bangsa mendatang.

Bentuk partisipasi yang diharapkan sekolah terhadap orang tua murid, tentunya didasarkan pada tujuan apa yang hendak dicapai oleh sekolah dalam proses pendidikan di sekolah. Tujuan yang ingin dicapai sekolah pada hakikatnya adalah tujuan pendidikan secara nasional, yaitu:

- a. Manusia yang bertaqwa, berbudi pekerti dan berkepribadian
- b. Disiplin, bekerja keras, bertanggung jawab serta mandiri
- c. Cerdas dan terampil
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Cinta tanah air dan mempunyai semangat kebangsaan serta kesetiakawanan sosial.

De Roche (1985) menyebutkan ada 5 hal pokok yang harus ditekankan dan menjadi perhatian utama untuk dibina, dikembangkan dan ditingkatkan sekolah melalui kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu :

1. ***Children's and parents work habits***. Kegiatan yang terkait dengan kebiasaan kerja anak di rumah sebagai bentuk partisipasi orang tua murid terhadap pendidikan di sekolah mencakup beberapa kegiatan sebagai berikut:
 - a) *Structure, routin and priorities* (kegiatan dan prioritas)
 - b) *Time to study, work, play, sleep, read* (waktu untuk belajar, kerja, tidur dan membaca)
 - c) *Space to do these things* (ruang untuk melakukan)
 - d) *Responsibility, punctually and sharing* (tanggung jawab, tepat waktu dan berbagi)
 - e) Hal ini dapat diimplementasikan dengan mengawasi perkembangan pribadi dan proses

belajar anak di rumah dan bila perlu memberi laporan dan berkonsultasi dengan pihak sekolah.

2. *Academy guidance and support.* Pengembangan akademik sebagai bentuk partisipasi orang tua murid kepada kepala sekolah, mencakup beberapa kegiatan berikut:

- a) *Encouragement, interest, and commitment* (dorongan, ketertarikan/minat, komitmen)
- b) *Prise, approval, and reward* (hadiah, persetujuan, dan penghargaan)
- c) *Knowledge of the child's strengths, weakness and learning problems* (pengetahuan akan kekuatan, kelemahan dan pembelajaran masalah).
- d) *Supervision of child.s homework, study and activities* (Pengawasan Tugas/PR, belajar)
- e) *Use reference materials* (menggunakan bahan referensi)
- f) Dapat diimplementasikan dengan membimbing anak belajar dan mengerjakan tugas dari sekolah.

3. *Stimulation to explore and discuss ideas and events.* Menstimulasi anak dan berdiskusi dengan anak di rumah sebagai bentuk partisipasi orang tua murid kepada sekolah, mencakup beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a) *Family/parent/child activities* (kegiatan keluarga orang tua/anak)
- b) *Conversations, games, hobbies, play, reading* (percakapan, permainan, hobi, bermain, membaca)
- c) *Family culture activities* (budaya keluarga)

- d) *Discussion of books, television, newspapers, magazines* (mendiskusikan buku, televisi, koran dan majalah)
- e) Dapat diimplementasikan dengan menceritakan sebuah cerita nasehat, bermain bersama, berdiskusi mengenai hal seputar fenomena yang terjadi pada anak-anak.

4. ***Language development in the home.*** Kegiatan pengembangan bahasa anak di rumah sebagai bentuk partisipasi orang tua murid kepada sekolah, mencakup beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a) *Mastery of mother tongue* (penguasaan bahasa ibu)
- b) *Correct language usage* (penggunaan bahasa yang benar)
- c) *Good speech habits* (kebiasaan bicara yang bagus)
- d) *Vocabulary and sentence pattern development* (kosakata dan pengembangan pola kalimat)
- e) *Listening, reading, talking and writing* (mendengarkan, membaca, bicara dan menulis).
- f) Dapat diimplementasikan dengan mengajari cara berbicara kepada yang lebih tua, dan sesama. Misalnya lebih sopan santun kepada orang tua, tidak berbicara kotor, dsb.

5. ***Accademic aspirations and expectations.*** Aspirasi akademik dan harapannya sebagai bentuk partisipasi orang tua murid kepada sekolah, mencakup beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a) *Motivation to learn well* (motivasi untuk belajar dengan baik)
- b) *Support, encouragement* (dukungan, dorongan)

- c) *Parent's knowledge of school activities, teachers, classes, subject* (pengetahuan orang tua akan aktivitas sekolah, guru, kelas, dan mata pelajaran).
- d) *Standarts and expectations* (standar dan harapan)
- e) *Assistence to child'e aspirations* (membantu aspirasi anak)
- f) *Friendships with others who have an interest in education* (Pertemanan dengan orang lain yang memiliki minat yang sama).
- g) *Sacrifices of time and money* (Pengorbanan waktu dan uang).
- h) Dapat diimplementasikan dengan mengikuti dan partisipasi dalam kegiatan sekolah yang melibatkan orang tua. Misalnya datang ke sekolah ketika mendapatkan undangan dari sekolah.

Apabila kita cermati pendapat di atas, Nampak bahwa apa yang diinginkan sekolah dari orang tua murid sebenarnya lebih cenderung untuk meningkatkan prestasi akademik dan nonakademik siswa. Jadi, komunikasi antara sekolah dengan masyarakat sebenarnya tidak hanya mencari bantuan uang/material semata-mata. Sangat salah apabila mencari bantuan material/dana menjadi tujuan utama dalam hubungan sekolah dengan masyarakat. Kondisi ini menjadi penyebab orang tua malas atau bahkan tidak mau datang ke sekolah kalau mendapat undangan dari pihak sekolah.

Komunikasi tentang pendidikan kepada masyarakat tidak cukup hanya dengan informasi verbal saja, tetapi perlu dilengkapi dengan pengalaman nyata yang ditunjukkan kepada masyarakat agar timbul citra positif tentang pendidikan di kalangan mereka, sebab masyarakat

pada umumnya ingin bukti nyata sebelum mereka memberikan dukungan (*National School Public Relation Association*). Bukti itu dapat ditunjukkan berupa pameran hasil produk sekolah, tayangan keberhasilan siswa sebagai juara cerdas cermat, juara olah raga, tayangan penemuan inovatif produktif siswa dan sekolah. Disamping itu bukti-bukti tersebut perlu disosialisasikan kepada masyarakat secara terbuka melalui berbagai media masa, baik media cetak maupun media elektronik sehingga dapat mencapai sasaran secara tepat dan menyeluruh.

Di negara yang sedang berkembang masyarakat masih sangat menggantungkan mutu pendidikan kepada pihak pemerintah padahal pemerintah sendiri memiliki keterbatasan dana untuk mendukung semua kegiatan dan kebutuhan sekolah secara optimal. Kekurangan sarana dan prasarana serta pembiayaan dan sumber daya ini dapat di atasi dengan dukungan dan kesediaan orang tua murid. masyarakat dan *stakeholder* berpartisipasi mengembangkan dan meningkatkan mutu sekolah.

Beberapa contoh partisipasi masyarakat dalam membudayakan empat pilar kebangsaan ialah :

- a. Mengawasi perkembangan pribadi dan proses belajar putra-putrinya di rumah dan bila perlu memberi laporan dan berkonsultasi dengan pihak sekolah (Nilai keselarasan dan keadilan).
- b. Menyediakan fasilitas belajar di rumah dan membimbing putra-putrinya agar belajar dengan penuh motivasi dan perhatian (nilai kedamaian).
- c. Menyediakan perlengkapan belajar yang dibutuhkan untuk belajar di lembaga pendidikan (sekolah) (nilai kesejahteraan).

- d. Berusaha melunasi SPP dan bantuan pendidikan lainnya (nilai mufakat, keadilan dan kedamaian)
- e. Memberikan umpan balik kepada sekolah tentang pendidikan terutama yang menyangkut keadaan putra-putrinya (nilai keadilan).
- f. Bersedia datang ke sekolah bila diundang atau diperlukan oleh sekolah (nilai keselarasan, kesetaraan, kebijaksanaan, persatuan dan kesatuan, serta kedamaian).
- g. Ikut berdiskusi memecahkan masalah-masalah pendidikan seperti Sarana prasarana, kegiatan, keuangan, program kerja dan sebagainya (nilai mufakat, kesejahteraan, kebijaksanaan, kesetaraan, persatuan dan kesatuan)
- h. Membantu fasilitas-fasilitas belajar yang dibutuhkan sekolah untuk memajukan proses pembelajaran (nilai kesejahteraan dan keselarasan).
- i. Meminjami alat-alat yang dibutuhkan sekolah untuk berpraktik, apabila sekolah memerlukannya (nilai kesejahteraan dan kedamaian).
- j. Bersedia menjadi tenaga pelatih narasumber bila diperlukan oleh sekolah (nilai kedamaian).
- k. Menerima para siswa dengan senang hati bila mereka belajar dilingkungan masyarakat (praktikum masalnya) (nilai kesetaraan, kedamaian, persatuan dan kesatuan).
- l. Memberi layanan/penjelasan kepada siswa yang sedang belajar dimasyarakat (nilai keberadaban)
- m. Menjadi responden yang baik dan jujur terhadap penelitian-penelitian siswa dan lembaga pendidikan (nilai keberadaban).

- n. Bagi ahli pendidikan bersedia menjadi ekspert dalam membina lembaga pendidikan yang berkualitas (nilai keberadaban).
- o. Bagi hartawan bersedia menjadi donator untuk pengembangan sekolah (nilai kesejahteraan dan kebijaksanaan).
- p. Ikut memperlancar komunikasi pendidikan (nilai mufakat).
- q. Mengajukan usul-usul untuk perbaikan pendidikan (nilai mufakat).
- r. Ikut mengontrol jalannya pendidikan (kontrol sosial) (nilai keadilan).
- s. Bagi tokoh-tokoh masyarakat bersedia menjadi partner manajemen pendidikan dalam mempertahankan dan memajukan lembaga pendidikan (nilai persatuan dan kesatuan).
- t. Ikut memikirkan dan merealisasikan kesejahteraan personalia pendidikan (nilai kesejahteraan dan kesetaraan).

BAB II NILAI-NILAI YANG DIKEMBANGKAN

A. Hakikat Nilai

Nilai dalam bahasa Inggris ialah *value* diartikan sebagai “harga, penghargaan atau taksiran”, yaitu harga yang melekat pada sesuatu atau penghargaan terhadap sesuatu (Kaelan, 2009, p. 123). Pengertian lain dari nilai adalah sesuatu yang berharga, baik, dan berguna bagi manusia.” Nilai adalah sesuatu penghargaan atau suatu kualitas terhadap suatu hal yang dapat menjadi dasar penentuan tingkah laku manusia (Winarno, 2007, p. 3).

Walter G. Everet (Kaelan, 2009, p. 176) menggolongkan nilai-nilai manusiawi ke dalam delapan kelompok yaitu:

- 1) Nilai-nilai ekonomis (ditentukan oleh harga pasar dan meliputi semua benda yang dapat dibeli).
- 2) Nilai-nilai kejasmanian (membantu pada kesehatan, efisiensi dan keindahan dari kehidupan badan).
- 3) Nilai-nilai hiburan (nilai-nilai permainan dan waktu senggang yang dapat menyumbangkan pada pengayaan kehidupan).
- 4) Nilai-nilai sosial (berasal mula dari keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan).
- 5) Nilai-nilai watak (keseluruhan dari keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan).
- 6) Nilai-nilai estetis (nilai-nilai keindahan dalam alam dan karya seni).
- 7) Nilai-nilai keagamaan.

B. Nilai Pilar Pancasila

Pilar pertama bagi tegak berdirinya negara-bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai pilar bangsa Indonesia karena dinilai memenuhi syarat sebagai pilar bagi negara sebesar dan seluas Indonesia yang pluralistik. Penetapan Pancasila sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut didasarkan pada pemikiran yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan. Alasan yang mendasari pertama karena Pancasila mampu mengakomodasi keanekaragaman kehidupan Bangsa. Kedua, Pancasila memiliki prinsip, konsep dan nilai yang merupakan kristalisasi dari sistem kepercayaan (*belief system*) yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia sehingga bisa menjamin kokohnya Pancasila sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lahirnya Pancasila sendiri tidak secara tiba-tiba pada tahun 1945, melainkan melalui proses yang panjang. Proses sejarah konseptualisasi Pancasila melintasi rangkaian panjang yang dimulai semenjak awal tahun 1900 dalam bentuk rintisan-rintisan gagasan. Proses lahirnya pancasila ditandai kemunculan berbagai organisasi pergerakan kebangkitan (Boedi Oetomo, SDI, SI, Muhammadiyah, NU, Perhimpunan Indonesia dan lain-lain), dan sumpah pemuda. Perumusan konseptualisasi Pancasila dimulai pada masa persidangan pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 29 Mei-1 Juni 1945.

Dalam menjawab permintaan Ketua BPUPKI, Radjiman Widyodiningrat mengenai dasar negara Indonesia merdeka, puluhan anggota BPUPKI berusaha menyodorkan pandangannya yang kebanyakan pokok gagasannya sesuai dengan satuan-satuan sila Pancasila. Rangkaian ini ditutup

dengan pidato Soekarno (1 Juni) yang menawarkan lima prinsip dasar negara yang diberi nama Pancasila. Rumusan Soekarno tentang Pancasila kemudian digodok melalui Panitia Delapan yang dibentuk oleh Ketua Sidang BPUPKI. Kemudian membentuk “Panitia Sembilan” yang menyempurnakan rumusan Pancasila dari Pidato Soekarno ke dalam rumusan versi Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Fase pengesahan dilakukan tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang menghasilkan rumusan final Pancasila yang mengikat secara konstitusional dalam kehidupan bernegara.

Dengan demikian, rangkaian dokumen sejarah yang bermula dari 1 Juni 1945, 22 Juni 1945, hingga teks final 18 Agustus 1945 itu dapat dimaknai sebagai satu kesatuan dalam proses kelahiran falsafah negara Pancasila. Memaknai kembali Pancasila berarti kita ingin menegaskan komitmen bahwa nilai-nilai Pancasila adalah dasar dan ideologi dalam kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila bukanlah konsep pemikiran semata, melainkan sebuah perangkat tata nilai untuk diwujudkan sebagai panduan dalam berbagai segi kehidupan. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan etika dan moral ketika kita membangun pranata politik, pemerintahan, ekonomi, pembentukan dan penegakan hukum, politik, sosial budaya dan berbagai aspek kehidupan lainnya.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 memuat rumusan lima nilai dasar sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Kelima sila tersebut merupakan satu kesatuan nilai kehidupan masyarakat Indonesia dan dasar negara Republik Indonesia. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga berkedudukan:

- a. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa,
- b. Pancasila sebagai Ideologi Negara,
- c. Pancasila sebagai ligatur (pemersatu) dalam perikehidupan kebangsaan dan kenegaraan,
- d. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

1. Pancasila sebagai Dasar Negara

Rumusan Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, dan dinyatakan sebagai dasar negara. Dalam setiap dasar negara terdapat dasar fikiran yang mendasar, merupakan cita hukum atau *rechtsidee* bagi negara-bangsa yang bersangkutan. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di antaranya disebutkan:

. . . , maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,

serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila menurut rumusan di atas berkedudukan sebagai dasar negara, sebagai *staatsidee*, cita negara sekaligus sebagai cita hukum atau *rechtsidee*. Cita hukum memiliki fungsi konstitutif dan regulatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala peraturan perundang-undangan harus merupakan derivasi dari prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Segala peraturan perundangan-undangan yang tidak konkordan apalagi bertentangan dengan Pancasila, batal demi hukum.

2. Berbagai Konsep dalam Pancasila

Konsep adalah gagasan umum dan abstrak, merupakan faham universal hasil olah pikir dan generalisasi manusia. Konsep adalah hasil konstruksi nalar manusia secara teoretik. Secara logik konsep berfungsi sebagai dalil, suatu gagasan yang memberikan makna terhadap fenomena atau hal ihwal sehingga ditemukan esensi atau hakikat dari fenomena atau hal ihwal dimaksud. Konsep dipergunakan oleh manusia untuk memberikan arti terhadap segala fenomena yang dialami oleh manusia, sekaligus sebagai acuan kritik dalam memberikan makna terhadap fenomena yang dihadapi.

Berbagai Konsep yang terdapat dalam Pancasila

a. Konsep Religiusitas

Konsep mengenai kekuatan gaib yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia ini adalah konsep religiositas, suatu konsep dasar yang

terdapat dalam setiap agama maupun keyakinan dan kepercayaan yang dianut oleh manusia. Pancasila mengandung konsep religiositas, suatu konsep yang mengakui dan meyakini bahwa di luar diri manusia terdapat kekuatan gaib yang menjadikan alam semesta, mengaturnya sehingga terjadi keselarasan dan keserasian. Sebagai akibat manusia Pancasila beriman dan bertakwa terhadap kekuatan gaib tersebut. Pancasila menyebutnya sebagai suatu panduan yang bernama Ketuhanan Yang Maha Esa, yang merupakan esensi dari segala agama dan kepercayaan yang berkembang di Indonesia.

b. Konsep Humanitas

Humanisme suatu faham yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai pribadi yang memiliki cirinya masing-masing secara tersendiri, atau yang biasa disebut sebagai jatidiri. Sebagai turunan dari anggapan tersebut manusia memiliki kebebasan dalam berfikir, mengemukakan pendapat, serta menentukan pilihan hidupnya.

c. Konsep Persatuan

Pada tanggal 1 Juni 1945 Bung Karno mengusulkan bahwa salah satu prinsip dasar negara adalah "kebangsaan." suatu prinsip bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan untuk kepentingan seseorang, golongan, tetapi suatu dasar "semua buat semua." Faham kebangsaan ini bukan merupakan faham kebangsaan yang sempit atau chauvinisme. Usul Bung Karno ini kemudian disepakati oleh BPUPKI menjadi persatuan Indonesia.

d. Konsep Souvereinitas

Sila keempat "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan," memberikan gambaran bagaimana selayaknya tata cara hubungan antara unsur-unsur yang terlibat kehidupan bersama, untuk selanjutnya bagaimana menentukan kebijakan dan langkah dalam menghadapi permasalahan hidup. Berbagai pihak memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud "kerakyatan" adalah yang oleh berbagai negara disebut demokrasi. Kerakyatan adalah demokrasi yang diterapkan di Indonesia yang memiliki ciri sesuai dengan latar belakang budaya bangsa Indonesia sendiri. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang berprinsip bahwa sumber kekuasaan atau wewenang dalam menyelenggarakan pemerintahan bersumber pada rakyat.

e. Konsep Sosialitas

Dikemukakan bahwa yang ingin diwujudkan dengan berdirinya negara Republik Indonesia ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang bermakna suatu masyarakat yang adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan, tidak ada *exploitation de l'homme par l'homme*. Sehingga akan terwujud masyarakat yang berbahagia, cukup sandang, cukup pangan, *gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja*.

3. Prinsip-Prinsip dalam Pancasila

Prinsip adalah gagasan dasar, berupa aksioma atau proposisi awal yang memiliki makna khusus, mengandung kebenaran berupa doktrin dan asumsi yang dijadikan landasan dalam menentukan sikap dan tingkah laku manusia. Prinsip dijadikan acuan dan dijadikan dasar menentukan pola pikir dan pola tindak sehingga mewarnai tingkah laku pendukung prinsip dimaksud. Sila-sila Pancasila itulah prinsip-prinsip Pancasila.

Berikut disampaikan prinsip-prinsip Pancasila dan penjabarannya.

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

- 1) Pengakuan adanya berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Setiap individu bebas memeluk agama dan kepercayaannya;
- 3) Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada pihak lain
- 4) Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
- 5) Saling hormat-menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaan
- 6) Saling menghargai terhadap keyakinan yang dianut oleh pihak lain
- 7) Beribadat sesuai dengan keyakinan agama yang dipeluknya, tanpa mengganggu kebebasan beribadat bagi pemeluk keyakinan lain
- 8) Dalam melaksanakan peribadatan tidak mengganggu ketenangan dan ketertiban umum.

b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

- 1) Hormati disposisi/kemampuan dasar manusia sebagai karunia Tuhan dengan mendudukan manusia sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya;
- 2) Hormatilah kebebasan manusia dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat;
- 3) Hormatilah sifat pluralistik bangsa

c. Persatuan Indonesia

- 1) Bangga pada negara-bangsanya atas kondisi yang terdapat pada negara-bangsanya serta prestasi-prestasi yang dihasilkan oleh warganegaranya.
- 2) Cinta pada negara-bangsanya serta rela berkorban demi negara-bangsanya.

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

- 1) Dalam mengambil keputusan bersama diutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Dalam mencari kesepakatan bersama tidak semata-mata berdasarkan pada suara terbanyak, tetapi harus berlandaskan pada tujuan yang ingin diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 3) Tidak menerapkan prinsip tirani minoritas dan hegemoni/dominasi mayoritas.
- 4) Mengacu pada prinsip *politiek-economische democratie* (Bung Karno), bahwa demokrasi harus mengantar rakyat Indonesia menuju

keadilan dan kemakmuran, *sociale rechtvaardigheid*.

e. **Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia**

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- 4) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara;
- 5) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- 6) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- 7) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan serta wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- 8) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

4. **Nilai-Nilai dalam Pancasila**

Adapun nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila yaitu sebagai berikut.

a. Kedamaian

Kedamaian adalah situasi yang menggambarkan tidak adanya konflik dan kekerasan. Segala unsur yang terlibat dalam suatu proses sosial berlangsung secara selaras, serasi dan seimbang, sehingga menimbulkan keteraturan, ketertiban dan ketenteraman. Segala kebutuhan yang diperlukan oleh manusia dapat terpenuhi, sehingga tidak terjadi perebutan kepentingan. Hal ini akan terwujud bila segala unsur yang terlibat dalam kegiatan bersama mampu mengendalikan diri.

b. Keimanan

Keimanan adalah suatu sikap yang menggambarkan keyakinan akan adanya kekuatan transendental yang disebut Tuhan Yang Maha Esa. Dengan keimanan manusia yakin bahwa Tuhan menciptakan dan mengatur alam semesta. Apapun yang terjadi di dunia adalah atas kehendak-Nya, dan manusia wajib untuk menerima dengan keikhlasan.

c. Ketaqwaan

Ketaqwaan adalah suatu sikap berserah diri secara ikhlas dan rela diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa, bersedia tunduk dan mematuhi segala perintah-Nya serta menjauhi segala larangan-Nya.

d. Keadilan

Keadilan adalah suatu sikap yang mampu menempatkan makhluk dengan segala permasalahannya sesuai dengan hak dan kewajiban serta harkat dan martabatnya secara proporsional

diselaraskan dengan peran fungsi dan kedudukannya.

e. Kesetaraan

Kesetaraan adalah suatu sikap yang mampu menempatkan kedudukan manusia tanpa membedakan jender, suku, ras, golongan, agama, adat dan budaya dan lain-lain. Setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum dan memperoleh kesempatan yang sama dalam segenap bidang kehidupan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya.

f. Keselarasan

Keselarasan adalah keadaan yang menggambarkan keteraturan, ketertiban dan ketaatan karena setiap makhluk melaksanakan peran dan fungsinya secara tepat dan proporsional, sehingga timbul suasana harmoni, tenteram dan damai. Ibarat suatu orkestra, setiap pemain berpegang pada partitur yang tersedia, dan setiap pemain instrumen melaksanakan secara taat dan tepat, sehingga terasa suasana nikmat dan damai.

g. Keberadaban

Keberadaban adalah keadaan yang menggambarkan setiap komponen dalam kehidupan bersama berpegang teguh pada ketentuan yang mencerminkan nilai luhur budaya bangsa. Beradab menurut bangsa Indonesia adalah apabila nilai yang terkandung dalam Pancasila direalisasikan sebagai acuan pola pikir dan pola tindak.

h. Persatuan dan Kesatuan

Persatuan dan kesatuan adalah keadaan yang menggambarkan masyarakat majemuk bangsa

Indonesia yang terdiri atas beranekaragamnya komponen namun mampu membentuk suatu kesatuan yang utuh. Setiap komponen dihormati dan menjadi bagian integral dalam satu sistem kesatuan negara-bangsa Indonesia.

i. Mufakat

Mufakat adalah suatu sikap terbuka untuk menghasilkan kesepakatan bersama secara musyawarah. Keputusan sebagai hasil mufakat secara musyawarah harus dipegang teguh dan wajib dipatuhi dalam kehidupan bersama

j. Kebijakanaksanaan

Kebijakanaksanaan adalah sikap yang menggambarkan hasil olah fikir dan olah rasa yang bersumber dari hati nurani dan bersendi pada kebenaran, keadilan dan keutamaan. Bagi bangsa Indonesia hal ini sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila.

k. Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah kondisi yang menggambarkan terpenuhinya tuntutan kebutuhan manusia, baik kebutuhan lahiriah maupun batiniah sehingga terwujud rasa puas diri, tenteram, damai dan bahagia. Kondisi ini hanya akan dapat dicapai dengan kerja keras, jujur dan bertanggungjawab.

C. Nilai Pilar UUD 1945

1. Makna Undang-Undang Dasar

Pilar kedua kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memahami dan mendalami UUD 1945, diperlukan memahami lebih dahulu makna

undang-undang dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Tanpa memahami prinsip yang terkandung dalam Pembukaan tersebut tidak mungkin mengadakan evaluasi terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam batang tubuhnya dan berbagai undang-undang yang menjadi derivatnya.

Beberapa pihak membedakan antara pengertian konstitusi dan undang-undang dasar. Misal dalam kepustakaan Belanda, di antaranya yang disampaikan oleh L.J. van Apeldoorn, bahwa konstitusi berisi seluruh peraturan-peraturan dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang berisi prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang mendasari kehidupan kenegaraan, sedang undang-undang dasar hanya memuat bagian yang tertulis saja. Istilah undang-undang dasar sangat mungkin terjemahan dari *grondwet* (bahasa Belanda), yang berasal dari kata *grond* yang bermakna dasar dan *wet* yang berarti hukum, sehingga *grondwet* bermakna hukum dasar. Atau mungkin juga dari istilah *Grundgesetz* yang terdiri dari kata *Grund* yang bermakna dasar dan *Gesetz* yang bermakna hukum. Sangat mungkin para *founding fathers* dalam menyusun rancangan UUD mengikuti pola pikir ini, hal ini terbukti dalam Penjelasan UUD 1945 dinyatakan hal sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah atura-aturan

dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.

Konstitusi berasal dari istilah Latin *constituere*, yang artinya menetapkan atau menentukan. Dalam suatu konstitusi terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dasar dan kewajiban warganegara suatu negara, perlindungan warganegara dari tindak sewenang-wenang sesama warganegara maupun dari penguasa. Konstitusi juga menentukan tatahubungan dan tatakerja lembaga yang terdapat dalam negara, sehingga terjalin suatu sistem kerja yang efisien, efektif dan produktif, sesuai dengan tujuan dan wawasan yang dianutnya.

Begitu banyak definisi tentang konstitusi, namun dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa konstitusi adalah:

- a) Keseluruhan peraturan-peraturan dasar suatu bangsa, negara atau organisasi politik, *body politics*, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
- b) Berisi ketentuan-ketentuan yang menetapkan pendistribusian kekuasaan yang berdaulat pada unsur, unit atau lembaga yang terdapat dalam organisasi politik atau negara dimaksud, secara horizontal dan vertikal dalam kehidupan bersama;
- c) Peraturan-peraturan dasar tersebut mengandung prinsip-prinsip dan norma-norma yang mendasari kehidupan bersama;
- d) Mengatur hak dan kewajiban dari segala unsur yang terlibat dalam kehidupan bermasyarakat dan atau bernegara;
- e) Menjamin dan melindungi hak-hak tertentu rakyat atau anggotanya.

2. Makna Pembukaan suatu Undang-Undang Dasar

Salah satu bagian yang penting dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah Pembukaannya, yang biasa disebut juga dengan istilah Preambule atau Mukaddimah. Dalam Pembukaan suatu UUD atau Konstitusi terkandung prinsip atau pandangan filsafat yang menjadi dasar perumusan pasal-pasal Batang Tubuh Konstitusi, yang dijadikan pegangan dalam hidup bernegara. Untuk itu marilah kita cermati rumusan Pembukaan UUD 1945 dimaksud.

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya;

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Prinsip-Prinsip dalam Pemukaan UUD

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dapat diuraikan sebagai berikut.

a) Sumber Kekuasaan

Di alinea ketiga disebutkan bahwa *“pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia itu atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa,”* yang bermakna bahwa kemerdekaan yang dinyatakan oleh bangsa Indonesia itu semata-mata karena mendapat rahmat dan ridho Allah Yang Maha Kuasa. Suatu pengakuan adanya suatu kekuasaan di atas kekuasaan manusia yang mengatur segala hal yang terjadi di alam semesta ini. Dengan kata lain bahwa kekuasaan yang diperoleh rakyat Indonesia dalam menyatakan kemerdekaan dan dalam mengatur kehidupan kenegaraan bersumber dari Allah Yang Maha Kuasa. Hal ini ditegaskan

lebih lanjut dalam dasar negara sila yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun di sisi lain, pada alinea ke-empat disebutkan bahwa “*Negara Republik Indonesia tersusun dalam bentuk kedaulatan rakyat,*” yang berarti bahwa sumber kekuasaan juga terletak di tangan rakyat. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam Bab I, pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “*Kedaulatan adalah di tangan rakyat, . . .*” Dari frase-frase tersebut di atas jelas bahwa sumber kekuasaan untuk mengatur kehidupan kenegaraan dan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dan Rakyat. Terdapat dua sumber kekuasaan yang diametral.

b) Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam Pembukaan UUD 1945, pernyataan mengenai hak asasi manusia tidak terumuskan secara eksplisit. Namun bila kita cermati dengan seksama akan nampak bahwa dalam Pembukaan UUD 1945 memuat begitu banyak frase yang berisi muatan hak asasi manusia. Berikut disampaikan beberapa rumusan yang menggambarkan tentang kepedulian para *founding fathers* tentang hak asasi manusia yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.

- a. Kemerdekaan yang dinyatakan oleh rakyat dan bangsa Indonesia adalah untuk “menciptakan kehidupan kebangsaan yang *bebas*,” salah satu hak asasi manusia yang selalu didambakan, dan dituntut oleh setiap manusia.

- b. Kemerdekaan Negara Indonesia berciri merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, merupakan gambaran tentang negara yang menjunjung hak asasi manusia. Hak kebebasan dan mengejar kebahagiaan diakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Keseluruhan alinea kesatu Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu pernyataan tentang hak asasi manusia, yakni kebebasan dan kesetaraan. Kemerdekaan, perikemanusiaan dan perikeadilan merupakan realisasi hak kebebasan dan kesetaraan.
- d. Sementara pasal 27, 28, 29, 30 dan 31 dalam batang tubuh UUD 1945 adalah pasal-pasal yang merupakan penjabaran hak asasi manusia.

c) Sistem Demokrasi

Sistem pemerintahan bagi bangsa Indonesia terdapat dalam alinea ke-empat yang menyatakan:” maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan srosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Frase ini menggambarkan sistem pemerintahan demokrasi.

Istilah kedaulatan rakyat atau kerakyatan adalah identik dengan demokrasi. Namun dalam penerapan demokrasi disesuaikan dengan adat budaya yang berkembang di Negara Indonesia. Sumber kekuasaan dalam berdemokrasi adalah dari Tuhan Yang Maha Esa sekaligus dari rakyat. Dalam menemukan sistem demokrasi di Indonesia pernah berkembang yang disebut “demokrasi terpimpin,” suatu ketika “demokrasi Pancasila,” ketika lain berorientasi pada paham liberalisme.

d) Paham Kebersamaan, Kegotongroyongan

Pembukaan UUD 1945 tidak diketemukan istilah individu atau orang, berbeda dengan konstitusi Amerika Serikat, bahwa konstitusinya adalah untuk mengabdikan pada kepentingan individu. Begitu banyak istilah bangsa diungkap dalam Pembukaan UUD 1945. Nampak dengan jelas bahwa maksud didirikannya Negara Republik Indonesia yang utama adalah untuk melayani kepentingan bangsa dan kepentingan bersama. Hal ini dapat ditemukan dalam frase sebagai berikut:

- a. Misi Negara di antaranya adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” bukan untuk melindungi masing-masing individu. Namun dengan rumusan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan individu diabaikan.
- b. Yang ingin diwujudkan dengan berdirinya Negara Indonesia adalah ;”suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Sekali lagi dalam rumusan tersebut tidak tersirat dan tersurat

kepentingan pribadi yang ditonjolkan, tetapi keseluruhan rakyat Indonesia.

Dari uraian yang disampaikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembukaan UUD 1945 dan beberapa pasalnya mengandung prinsip-prinsip yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Apabila prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila ini diterapkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan, maka akan tercipta suasana kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang, sehingga akan terasa suasana nyaman, nikmat dan adil.

D. Nilai Pilar NKRI

Menurut C.F. Strong negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional/pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat. Dengan demikian maka kedaulatannya tidak terbagi.

Pada alinea kedua disebutkan: ” . . . *dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.*” Kata atau istilah bersatu tidak dapat dimaknai bahwa kedaulatan negara terpusat atau terdistribusi pada pemerintah pusat dan negara bagian, sehingga tidak dapat dijadikan landasan untuk menentukan apakah Negara Republik Indonesia

berbentuk federal atau kesatuan. Mungkin salah satu landasan argument bagi bentuk negara adalah rumusan sila ketiga yakni “persatuan Indonesia.” Landasan inipun dipandang tidak kuat sebagai argument ditentukannya bentuk negara kesatuan. Untuk itu perlu dicarikan landasan pemikiran mengapa bangsa Indonesia menentukan bentuk Negara Kesatuan, bahkan telah dinyatakan oleh berbagai pihak sebagai ketentuan final.

Bentuk Negara Kesatuan adalah ketentuan yang diambil oleh para *founding fathers* pada tahun 1945 berdasarkan berbagai pertimbangan dan hasil pembahasan yang cukup mendalam. Namun dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia pernah juga menerapkan bentuk negara federal sebagai akibat atau konsekuensi hasil konferensi meja bundar di Negeri Belanda pada tahun 1949. Namun penerapan pemerintah federal ini hanya berlangsung sekitar 7 bulan untuk kemudian kembali menjadi bentuk Negara kesatuan. Sejak itu Negara Republik Indonesia berbentuk kesatuan sampai dewasa ini, meskipun wacana mengenai negara federal masih sering timbul pada permukaan, utamanya setelah Negara-bangsa Indonesia memasuki era reformasi. Namun nampaknya telah disepakati oleh segala pihak bahwa bentuk negara kesatuan merupakan pilihan final bangsa.

E. Nilai Pilar Bhineka Tunggal Ika

1. Bhinneka Tunggal Ika

Indonesia merupakan masyarakat majemuk (*plural societies*) (Puspita and Arif, 2014). Kemajemukan masyarakat Indonesia secara horizontal ditandai adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta perbedaan kedaerahan. sedangkan

secara vertikal ditandai adanya perbedaan antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam (Nasikun, 2012, p. 35). Mengelola masyarakat majemuk tidak bisa diterima begitu saja (*taken for granted*) ataupun hanya dengan coba-coba (*trial and error*) (Azra, 2006, p. 153), namun harus dengan cara sistematis, programatis, terintegrasi dan berkesinambungan. Hal itu perlu dilakukan karena kemajemukan yang ada di Indonesia sudah ada dengan sendirinya dan bukan karena hadirnya pendatang baru yang berlainan etnik, ras atau agama. Karena sejak dulu masyarakat Indonesia memang plural sekaligus heterogen, maka para pendiri bangsa (*The Founding Fathers*) menjadikan sasanti Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesanti atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh Mpu Tantular, pujangga agung kerajaan Majapahit yang hidup pada masa pemerintahan Raja Hayamwuruk, di abad ke empat belas (1350-1389). Sesanti tersebut terdapat dalam karyanya; kakawin Sutasoma yang berbunyi “Bhinna ika tunggal ika, tan hana dharma mangrwa, “ yang artinya “Berbeda-beda itu, satu itu, tak ada pengabdian yang mendua.” Semboyan yang kemudian dijadikan prinsip dalam kehidupan dalam pemerintahan kerajaan Majapahit itu untuk mengantisipasi adanya keaneka-ragaman agama yang dipeluk oleh rakyat Majapahit pada waktu itu. Meskipun mereka berbeda agama tetapi mereka tetap satu dalam pengabdian.

Pada tahun 1951, sekitar 600 tahun setelah pertama kali semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diungkap oleh mPu Tantular, ditetapkan oleh

pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah No.66 tahun 1951. Peraturan Pemerintah tersebut menentukan bahwa sejak 17 Agustus 1950, Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan sebagai seboyan yang terdapat dalam Lambang Negara Republik Indonesia, “Garuda Pancasila.” Kata “bhinna ika,” kemudian dirangkai menjadi satu kata “bhinneka”. Pada perubahan UUD 1945 yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika dikukuhkan sebagai semboyan resmi yang terdapat dalam Lambang Negara, dan tercantum dalam pasal 36a UUD 1945.

2. Konsep Dasar Bhineka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan. Pluralistik bukan pluralisme, suatu faham yang membiarkan keanekaragaman seperti apa adanya. Membiarkan setiap entitas yang menunjukkan ke-berbedaan tanpa peduli adanya common denominator pada keanekaragaman tersebut. Dengan faham pluralisme tidak perlu adanya konsep yang mensubstitusi keanekaragaman. Demikian pula halnya dengan faham multikulturalisme. Masyarakat yang menganut faham pluralisme dan multikulturalisme, ibarat onggokan material bangunan yang dibiarkan teronggok sendiri-sendiri, sehingga tidak akan membentuk suatu bangunan yang namanya rumah.

Ada baiknya dalam rangka lebih memahami makna pluralistik bangsa difahami pengertian pluralisme, agar dalam penerapan konsep pluralistik tidak terjerumus ke dalam faham pluralisme. Pluralisme berasal dari kata plural yang berarti banyak, adalah suatu faham yang

mengakui bahwa terdapat berbagai faham atau entitas yang tidak tergantung yang satu dari yang lain. Masing-masing faham atau entitas berdiri sendiri tidak terikat satu sama lain, sehingga tidak perlu adanya substansi pengganti yang mensubstitusi faham-faham atau berbagai entitas tersebut. Salah satu contoh misal di Indonesia terdapat ratusan suku bangsa. Menurut faham pluralisme setiap suku bangsa dibiarkan berdiri sendiri lepas yang satu dari yang lain, tidak perlu adanya substansi lain, misal yang namanya bangsa, yang mereduksi eksistensi suku-suku bangsa tersebut.

Faham pluralisme melahirkan faham individualisme yang mengakui bahwa setiap individu berdiri sendiri lepas dari individu yang lain. Faham individualisme ini mengakui adanya perbedaan individual atau yang biasa disebut individual differences. Setiap individu memiliki cirinya masing-masing yang harus dihormati dan dihargai seperti apa adanya. Faham individualisme ini yang melahirkan faham liberalisme, bahwa manusia terlahir di dunia dikaruniai kebebasan. Hanya dengan kebebasan ini maka harkat dan martabat individu dapat didudukkan dengan semestinya. Trilogi faham pluralisme, individualisme dan liberalisme inilah yang melahirkan sistem demokrasi dalam sistem pemerintahan utamanya di Negara Barat.

Pluralitas adalah sifat atau kualitas yang menggam-barkan keanekaragaman; suatu pengakuan bahwa alam semesta tercipta dalam keaneka ragaman. Sebagai contoh bangsa Indonesia mengakui bahwa Negara-bangsa Indonesia bersifat pluralistik, beraneka ragam ditinjau dari suku-bangsanya, adat budayanya, bahasa ibunya, agama yang dipeluknya, dan sebagainya.

Hal ini merupakan suatu kenyataan atau keniscayaan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Keaneka ragaman ini harus didudukkan secara proporsional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, harus dinilai sebagai asset bangsa, bukan sebagai faktor penghalang kemajuan. Perlu kita cermati bahwa pluralitas ini merupakan sunnatullah.

Seperti dikemukakan di atas, pola sikap bangsa Indonesia dalam menghadapi keanekaragaman ini berdasar pada suatu sasanti atau adagium “Bhinneka Tunggal Ika,” yang bermakna beraneka tetapi satu, yang hampir sama dengan motto yang dipegang oleh bangsa Amerika, yakni “*e pluribus unum.*” Dalam menerapkan pluralitas dalam kehidupan, bangsa Indonesia mengacu pada prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa yang diutamakan adalah kepentingan bangsa bukan kepentingan individu, berikut frase-frase yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945:

- a. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa;
- b. Bahwa kemerdekaan yang dinyatakan oleh bangsa Indonesia, supaya rakyat dapat berkehidupan kebangsaan yang bebas;
- c. Bahwa salah satu misi Negara-bangsa Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Bahwa salah satu dasar Negara Indonesia adalah Persatuan Indonesia, yang tiada lain merupakan wawasan kebangsaan.
- e. Bahwa yang ingin diwujudkan dengan berdirinya Negara-bangsa Indonesia adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari frase-frase yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut jelas bahwa prinsip kebangsaan mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Istilah individu atau konsep individualisme tidak terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan kata lain bahwa sifat pluralistik yang diterapkan di Indonesia tidak berdasar pada individualisme dan liberalisme. Pluralitas atau pluralistik tidak merupakan suatu paham, isme atau keyakinan yang bersifat mutlak. Untuk itu tidak perlu dikembangkan ritual-ritual tertentu seperti halnya agama.

Prinsip pluralistik dan multikulturalistik adalah asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan daerah, dan ras. Kemajemukan tersebut dihormati dan dihargai serta didudukkan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh. Kemajemukan bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing komponen bangsa, untuk selanjutnya diikat secara sinerjik menjadi kekuatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa.

3. Prinsip-Prinsip dalam Bhineka Tunggal Ika

Agar dapat mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dipandang perlu untuk memahami secara mendalam prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka

Tunggal Ika. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dalam rangka membentuk kesatuan dari keanekaragaman tidak terjadi pembentukan konsep baru dari keanekaragaman konsep-konsep yang terdapat pada unsur-unsur atau komponen bangsa. Suatu contoh di negara tercinta ini terdapat begitu aneka ragam agama dan kepercayaan. Dengan ke-tunggalan Bhinneka Tunggal Ika tidak dimaksudkan untuk membentuk agama baru. Setiap agama diakui seperti apa adanya, namun dalam kehidupan beragama di Indonesia dicari common denominator, yakni prinsip-prinsip yang ditemui dari setiap agama yang memiliki kesamaan, dan common denominator ini yang kita pegang sebagai ke-tunggalan, untuk kemudian dipergunakan sebagai acuan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Demikian pula halnya dengan adat budaya daerah, tetap diakui eksistensinya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan kebangsaan. Fahaman Bhinneka Tunggal Ika, yang oleh Ir Sujanto disebut sebagai fahaman Tantalisme, bukan fahaman sinkretisme, yang mencoba untuk mengembangkan konsep baru dari unsur asli dengan unsur yang datang dari luar.
- b. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat sektarian dan eksklusif; hal ini bermakna bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dibenarkan merasa dirinya yang paling benar, paling hebat, dan tidak mengakui harkat dan martabat pihak lain. Pandangan sektarian dan eksklusif ini akan memicu terbentuknya keakuan yang berlebihan dengan tidak

atau kurang memperhitungkan pihak lain, memupuk kecurigaan, kecemburuan, dan persaingan yang tidak sehat. Bhinneka Tunggal Ika bersifat inklusif. Golongan mayoritas dalam hidup berbangsa dan bernegara tidak memaksakan kehendaknya pada golongan minoritas.

- c. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalistis yang hanya menunjukkan perilaku semu. Bhinneka Tunggal Ika dilandasi oleh sikap saling percaya mempercayai, saling hormat menghormati, saling cinta mencintai dan rukun. Hanya dengan cara demikian maka keanekaragaman ini dapat dipersatukan.
- d. Bhinneka Tunggal Ika bersifat konvergen tidak divergen, yang bermakna perbedaan yang terjadi dalam keanekaragaman tidak untuk dibesarkan, tetapi dicari titik temu, dalam bentuk kesepakatan bersama. Hal ini akan terwujud apabila dilandasi oleh sikap toleran, non sektarian, inklusif, akomodatif, dan rukun.

Prinsip atau asas pluralistik dan multikultural Bhinneka Tunggal Ika mendukung nilai:

- 1) Inklusif, tidak bersifat eksklusif
- 2) Terbuka
- 3) Ko-eksistensi damai dan kebersamaan
- 4) Kesetaraan
- 5) Tidak merasa yang paling benar
- 6) Tolerans
- 7) Musyawarah disertai dengan penghargaan terhadap pihak lain yang berbeda.

Suatu masyarakat yang tertutup atau eksklusif sehingga tidak memungkinkan terjadinya perkembangan

tidak mungkin menghadapi arus globalisasi yang demikian deras dan kuatnya, serta dalam menghadapi keanekaragaman budaya bangsa.

Sifat terbuka yang terarah merupakan syarat bagi berkembangnya masyarakat modern. Sehingga keterbukaan dan berdiri sama tinggi serta duduk sama rendah, memungkinkan terbentuknya masyarakat yang pluralistik secara ko-eksistensi, saling hormat menghormati, tidak merasa dirinya yang paling benar dan tidak memaksakan kehendak yang menjadi keyakinannya kepada pihak lain. Segala peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah harus mampu mengakomodasi masyarakat yang pluralistik dan multikultural, dengan tetap berpegang teguh pada dasar negara Pancasila dan UUD 1945.

Suatu peraturan perundang-undangan, utamanya peraturan daerah yang memberi peluang terjadinya perpecahan bangsa, atau yang semata-mata untuk mengakomodasi kepentingan unsur bangsa harus dihindari. Suatu contoh persyaratan untuk jabatan daerah harus dari putra daerah, menggambarkan sempitnya kesadaran nasional yang semata-mata untuk memenuhi aspirasi kedaerahan, yang akan mengundang terjadinya perpecahan. Hal ini tidak mencerminkan penerapan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut secara konsisten akan terwujud masyarakat yang damai, aman, tertib, teratur, sehingga kesejahteraan dan keadilan akan terwujud.

4. Implementasi Bhinneka Tunggal Ika

Setelah kita fahami beberapa prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika, maka langkah

selanjutnya adalah bagaimana prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika ini diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

a. Perilaku inklusif

Dalam kehidupan bersama yang menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memandang bahwa dirinya, baik itu sebagai individu atau kelompok masyarakat merasa dirinya hanya merupakan sebagian dari kesatuan dari masyarakat yang lebih luas. Betapa besar dan penting kelompoknya dalam kehidupan bersama, tidak memandang rendah dan menyepelkan kelompok yang lain. Masing-masing memiliki peran yang tidak dapat diabaikan, dan bermakna bagi kehidupan bersama.

b. Mengakomodasi sifat pluralistik

Bangsa Indonesia sangat pluralistik ditinjau dari keragaman agama yang dipeluk oleh masyarakat, aneka adat budaya yang berkembang di daerah, suku bangsa dengan bahasanya masing-masing, dan menempati ribuan pulau yang tiada jarang terpisah demikian jauh pulau yang satu dari pulau yang lain. Tanpa memahami makna pluralistik dan bagaimana cara mewujudkan persatuan dalam keanekaragaman secara tepat, dengan mudah terjadi disintegrasi bangsa. Sifat toleran, saling hormat menghormati, mendudukan masing-masing pihak sesuai dengan peran, harkat dan martabatnya secara tepat, tidak memandang remeh pada pihak lain, apalagi menghapus eksistensi kelompok dari kehidupan bersama, merupakan syarat bagi lestariannya negara-bangsa Indonesia. Kerukunan hidup perlu dikembangkan dengan sepatutnya.

c. Tidak mencari menangnya sendiri

Menghormati pendapat pihak lain, dengan tidak beranggapan bahwa pendapatnya sendiri yang paling benar, dirinya atau kelompoknya yang paling hebat perlu diatur dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Dapat menerima dan memberi pendapat merupakan hal yang harus berkembang dalam kehidupan yang beragam. Perbedaan ini tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi dicari titik temu. Bukan dikembangkan divergensi, tetapi yang harus diusahakan adalah terwujudnya konvergensi dari berbagai keanekaragaman. Untuk itu perlu dikembangkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

d. Musyawarah untuk mencapai mufakat

Dalam rangka membentuk kesatuan dalam keanekaragaman diterapkan pendekatan “musyawarah untuk mencapai mufakat.” Bukan pendapat sendiri yang harus dijadikan kesepakatan bersama, tetapi *common denominator*, yakni inti kesamaan yang dipilih sebagai kesepakatan bersama. Hal ini hanya akan tercapai dengan proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan cara ini segala gagasan yang timbul diakomodasi dalam kesepakatan. Tidak ada yang menang tidak ada yang kalah. Inilah yang biasa disebut sebagai *win win solution*.

e. Dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban

Dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dilandasi oleh rasa kasih sayang. Saling curiga mencurigai harus dibuang jauh-jauh. Saling percaya

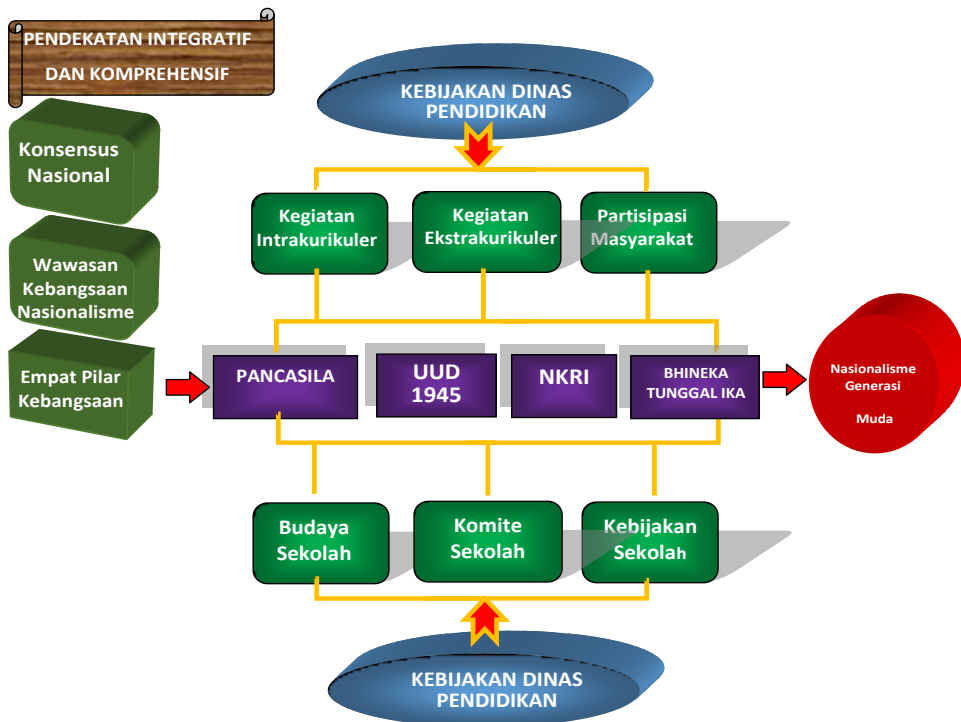
mempercayai harus dikembangkan, iri hati, dengki harus dibuang dari kamus Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini akan berlangsung apabila pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika menerapkan adagium *“teladi sesamining dumadi, sepi ing pamrih, rame ing gawe, jer basuki mowo beyo.”* Eksistensi kita di dunia adalah untuk memberikan pelayanan kepada pihak lain, dilandasi oleh tanpa pamrih pribadi dan golongan, disertai dengan pengorbanan.

Tanpa pengorbanan, sekurang-kurangnya mengurangi kepentingan dan pamrih pribadi, kesatuan tidak mungkin terwujud. Bila setiap warganegara memahami makna Bhinneka Tunggal Ika, meyakini akan ketepatannya bagi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mau dan mampu mengimplementasikan secara tepat dan benar insya Allah, Negara Indonesia akan tetap kokoh dan bersatu selamanya.

BAB III LANDASAN TEORITIS DAN DESKRIPSI MODEL

A. Deskripsi Model Pendekatan Integratif dan Komprehensif Pembudayaan Empat Pilar Kebangsaan

Pendekatan integratif dan komprehensif dalam pelaksanaan pembudayaan empat pilar kebangsaan perlu dilakukan secara terencana dengan baik. Model pendekatan empat pilar secara integratif dan komprehensif bisa digambarkan dalam model gambar 3.1 sebagai berikut.



Gambar 3.1
Pendekatan Integratif dan Komprehensif Pembudayaan Empat
Pilar Kebangsaan

B. Langkah-Langkah Pendekatan Integratif dan Komprehensif Pembudayaan Empat Pilar Kebangsaan

Berdasarkan bagan di atas, model pendekatan empat pilar kebangsaan dilakukan melalui pendekatan integratif dan komprehensif. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses, sedangkan pendekatan komprehensif artinya menyeluruh. Jadi model pendekatan empat pilar kebangsaan melalui pendekatan integratif dan komprehensif berarti model disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara berbagai aspek secara menyeluruh dan menyatu.

Model pendekatan secara integratif dan komprehensif dapat dijabarkan langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Negara kita memiliki konsensus dasar seluruh rakyat Indonesia yang harus dipatuhi oleh seluruh elemen bangsa. Konsensus nasional merupakan kekuatan yang menjadi harga mati, perekat dan pengikat kuatnya nasionalisme, persatuan dan kesatuan negara dan bangsa Indonesia. Konsensus nasional meliputi empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur memiliki wewenang untuk membudayakan empat pilar kebangsaan melalui perumusan teknis bidang pendidikan dimana empat pilar kebangsaan diintegrasikan di dalamnya. Dinas Pendidikan menetapkan kebijakan agar sekolah-sekolah di seluruh Kabupaten Sidoarjo membudayakan empat pilar kebangsaan. Sekolah wajib mengintegrasikan budaya empat pilar tersebut kedalam kegiatan intrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, budaya sekolah dan melalui partisipasi masyarakat.

3. Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo melalui kebijakannya, supaya menghimbau sekolah-sekolah terkait untuk merumuskan program pembudayaan empat pilar kebangsaan di sekolah masing-masing dengan melibatkan komite sekolah sehingga pembudayaan empat pilar berjalan sesuai harapan.
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo melalui kebijakannya, supaya menghimbau sekolah-sekolah terkait untuk merumuskan program pembudayaan empat pilar kebangsaan di sekolah masing-masing ke dalam kebijakan sekolah dan budaya sekolah.

Pembudayaan empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) yang dilaksanakan secara integratif dan komprehensif melalui kegiatan intrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, Budaya Sekolah dan partisipasi masyarakat tersebut diharapkan bisa membangun dan menanamkan rasa nasionalisme dalam jiwa generasi muda Indonesia.

C. Landasan Teoritis

1. Pengertian Pendekatan komprehensif

Istilah komprehensif dalam pendidikan nilai mencakup beberapa aspek. Pertama, isi pendidikan nilai harus komprehensif, yaitu meliputi semua permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan nilai-nilai yang bersifat pribadi sampai pada permasalahan yang mengenai etika secara umum. Kedua, metode pendidikan nilai juga harus komprehensif. Termasuk penanaman nilai (inkulkasi), pemberian keteladanan, memfasilitasi serta pengembangan keterampilan akademik dan sosial. Ketiga, pendidikan nilai hendaknya terjadi secara keseluruhan proses pendidikan di sekolah. Tidak hanya dalam proses

pembelajaran dikelas tetapi juga dalam kegiatan ekstrakurikuler, dalam proses bimbingan dan penyuluhan dan semua aspek kehidupan. Keempat, pendidikan nilai hendaknya juga melalui kehidupan masyarakat. Selain dari keluarga yaitu orang tua melainkan juga dari organisasi-organisasi dimasyarakat atau lembaga keagamaan, seperti TPA atau TPQ, sehingga semuanya perlu berpartisipasi dalam penanaman pendidikan nilai guna memperbaiki karakter dan moral generasi bangsa.

Berdasarkan lingkaran atau skema pendekatan karakter komprehensif pendidikan karakter oleh Thomas Lickona, bahwa karakter berasal dari rasa tanggung jawab dan rasa menghargai. Lalu karakter tersebut terbentuk karena adanya:

- a. Mengetahui karakter tersebut, baik atau tidaknya karakter yang ia sudah ketahui
- b. Merasakan karakter tersebut, sudah mulai merasakan dan tertanam karakter tersebut
- c. Tindakan atau implementasi karakter tersebut.

Di dalam ruang kelas, sebuah pendekatan komprehensif menuntut guru untuk:

- 1) Bertindak sebagai seorang penyayang, model, dan mentor yang memperlakukan siswa dengan kasih sayang dan menghargai, memberikan contoh yang baik, mendukung kebiasaan yang bersifat sosial, dan memperbaiki jika ada yang salah.
- 2) Menciptakan sebuah komunitas yang bermoral di dalam ruang kelas, membantu siswa untuk saling mengenal, saling menghormati, dan menjaga satu sama lain, dan merasa bagian dari kelompok.
- 3) Berlatih memiliki disiplin moral, menggunakan aturan-aturan sebagai kesempatan untuk membantu

menegakkan moral, control terhadap diri sendiri, dan sebuah generalisasi rasa hormat bagi orang lain.

- 4) Menciptakan sebuah lingkungan kelas yang demokratis, melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan dan berbagi tanggung jawab untuk menciptakan ruang kelas yang baik serta nyaman untuk belajar.
- 5) Mengajarkan nilai-nilai yang baik melalui kurikulum, menggunakan pelajaran akademik sebagai perantara untuk membahas permasalahan etika.
- 6) Menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif dalam mengajar anak-anak untuk bersikap dan dapat saling membantu, serta bekerja sama

Kemudian pendekatan komprehensif menuntut sekolah untuk:

- a) Memiliki sifat penyayang di luar lingkungan kelas dengan menggunakan peran model yang inspiratif, memberikan pelayanan sekolah dan komunitas kepada para siswa untuk membantu mereka mempelajari bagaimana cara peduli terhadap orang lain, memberikan kepedulian yang nyata kepada mereka.
- b) Menciptakan kebudayaan moral yang positif, mengembangkan lingkungan sekolah secara menyeluruh, yang mendukung dan memperkuat nilai-nilai yang diajarkan di dalam kelas.
- c) Mengikutsertakan wali murid dan masyarakat sekitar sebagai rekan kerja untuk mengajarkan nilai-nilai pendidikan karena wali murid mendukung sekolah dan segala upayanya untuk menanamkan nilai-nilai yang baik, dan mencari dukungan lain untuk mendukung sekolah, untuk memperkuat nilai-nilai tersebut yang coba diajarkan oleh pihak sekolah.

2. Pendekatan Komprehensif Empat Pilar Kebangsaan

Pendekatan komprehensif merupakan pendekatan yang secara menyeluruh, dengan memperhatikan keterkaitan dari berbagai aspek yang saling menyatu. Lalu pendidikan karakter adalah upaya dalam pembentukan etika, rasa kepedulian, dan bertanggung jawab dengan cara pengajaran serta penerapan. Pendidikan karakter dengan menggunakan pendekatan komprehensif memberikan upaya yang mendukung dalam pelaksanaan pembentukan karakter. Karena dengan pendekatan tersebut saling adanya keterkaitan komponen dalam pendidikan karakter.

Pendekatan komprehensif dalam rangka mengimplementasikan pembudayaan empat pilar kebangsaan untuk membangun nasionalisme generasi muda perlu dilakukan. Melalui pendekatan yang komprehensif maka empat pilar kebangsaan yang meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika menjadi lebih mudah dipraktikkan dalam mewujudkan generasi yang cinta tanah air. Pendekatan komprehensif memberi ruang bagi terciptanya hasil yang maksimal bagi siswa untuk memahami nilai-nilai empat pilar kebangsaan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan dan pembudayaan empat pilar kebangsaan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, keempatnya harus dijalankan secara beriringan demi kemajuan siswa.

3. Pembelajaran Terintegrasi

Pembelajaran terintegrasi adalah salah satu model pembelajaran bertujuan untuk membiasakan pembelajar untuk melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang. Atau dengan kata lain, melatih pembelajar untuk berpikir secara

lebih sistemik. Pembelajaran terintegrasi adalah pendekatan yang bertujuan untuk menjadi pembelajaran lebih menyeluruh dan berdasarkan pada paradigma pembelajaran yang holistik. Pembelajaran terintegrasi melihat pentingnya melihat gambaran yang lebih besar (*the big picture*) daripada sekadar mengelompokkan pembelajaran ke bagian-bagian kecil yang terpisah satu sama lain.

Menurut Chiarotto (2011), ada berbagai manfaat dari pembelajaran terintegrasi di antaranya :

- a. pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan mempelajari bidang tertentu
- b. pemahaman mengenai aplikasi dari bidang yang dipelajari dalam berbagai konteks
- c. pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu isu/topik dengan melihatnya dari berbagai sudut pandang
- d. membantu pembelajar menghargai bagaimana bidang-bidang studi, ide-ide, dan berbagai perspektif yang berbeda terkoneksi di dunia
- e. meningkatkan pemahaman dalam berpikir sistem

Pendekatan pembelajaran terpadu, menurut Aminuddin (1994), merupakan perencanaan dan proses pembelajaran yang ditujukan untuk menguntai tema, topik, pemahaman, dan pengalaman belajar secara terpadu. Pembelajaran terpadu itu sebagai wawasan dan bentuk kegiatan berfikir ketika guru merencanakan kegiatan belajar mengajar dengan berlandas tumpu pada prinsip-prinsip:

a. *Humanisme*

Manusia secara fitrah memiliki bekal yang sama dalam upaya memahami sesuatu. Implikasi wawasan tersebut dalam kegiatan pendidikan.

- a. Guru bukan satu-satunya sumber informasi.
- b. Siswa/murid disikapi sebagai subjek belajar yang kreatif mampu menemukan pemahaman sendiri.
- c. Dalam proses belajar mengajar, guru lebih banyak bertindak sebagai model, teman pendamping, pemotivasi, penyedia bahan pembelajaran, aktor yang juga bertindak sebagai pembelajar.

b. *Progresifisme*

Prilaku manusia dilandasi motif dan minat tertentu. Implikasi wawasan tersebut dalam kegiatan pendidikan :

- a. Isi pembelajaran harus memiliki kegunaan bagi pebelajar secara aktual.
- b. Dalam kegiatan belajarnya siswa/murid harus menyadari manfaat penguasaan isi pembelajaran itu bagi kehidupannya.
- c. Isi pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan, pengalaman dan pengetahuan pembelajar.

c. *Rekonstruksionisme*

Manusia selain memiliki kesamaan juga memiliki kekhasan. Implikasi wawasan tersebut dalam kegiatan pendidikan :

- a. Layanan pembelajaran selain bersifat klasikal juga bersifat individual.

- b. Pebelajar selain ada yang menguasai isi pembelajaran secara cepat juga ada yang menguasai isi secara lambat.
- c. Pebelajar perlu disikapi sebagai subjek yang unik, baik itu menyangkut proses merasa, berfikir dan karakteristik individualnya sebagai hasil bentukan lingkungan keluarga, teman bermain, maupun lingkungan kehidupan sosial masyarakatnya.

Seiring hal tersebut, pendekatan terintegrasi (serta komprehensif) dapat diaplikasikan dalam pendidikan nilai/karakter. Pendidikan nilai/karakter bagi peserta didik, akhir-akhir ini mendapat perhatian khusus dari Kementerian Pendidikan Nasional dan jajarannya, serta ahli-ahli kependidikan, dan sampai pada kesimpulan bahwa pendidikan nilai/karakter peserta didik perlu ditingkatkan. Hal tersebut disebabkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) hasilnya belum seperti yang diharapkan.

Dalam UU Sisdiknas Nomor 20/2003 Pasal 3 disebutkan "Pendidikan nasional (a) berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, (b) bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab." Tujuan pendidikan nasional tersebut sangat luhur dalam pembentukan peserta didik untuk menjadi anak bangsa yang memiliki nilai/karakter luhur.

Pada era globalisasi saat ini memang bangsa kita telah mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang secara kuantitas sudah memadai, namun dari segi kualitas masih sangat perlu ditingkatkan agar dihasilkan SDM yang mampu berkompetisi dengan negara berkembang, bahkan negara maju. Selain SDM yang demikian, masih ada satu hal penting yang harus ditekankan, yaitu menghasilkan SDM yang beretika, bermoral, sopan santun, dan mampu berinteraksi dengan masyarakat secara baik, dengan tetap memegang teguh kepribadian bangsa. Dengan kata lain, bangsa kita menginginkan terbentuknya generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berkualitas akhlaknya sekaligus cerdas intelektualnya. Banyak contoh anak didik yang cerdas, tetapi kualitas akhlaknya kurang baik, maka mereka tidak dapat diharapkan untuk menjadi generasi penerus yang dapat membangun bangsa kita.

Berdasarkan penelitian di Harvard University Amerika menunjukkan kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (hard skill), tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain (soft skill). Penelitian ini mengungkapkan, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20% oleh hard skill dan sisanya 80% oleh soft skill. Bahkan orang-orang tersukses di dunia dapat berhasil dikarenakan lebih banyak didukung kemampuan soft skill daripada hard skill. Hal ini mengisyaratkan bahwa mutu pendidikan karakter peserta didik sangat penting untuk ditingkatkan, karena otak yang hebat tanpa disertai kepribadian yang baik, maka akan sulit diterima di masyarakat nasional maupun internasional.

Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia yang berkualitas akhlaknya. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen (stakeholders) harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesesuaian dan mutu pendidikan karakter, Kementerian Pendidikan Nasional mengembangkan grand design pendidikan karakter untuk setiap jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan. Grand design menjadi rujukan konseptual dan operasional pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian pada setiap jalur dan jenjang pendidikan. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural tersebut dikelompokkan dalam: Olah Hati (Spiritual and emotional development), Olah Pikir (intellectual development), Olah Raga dan Kinestetik

(Physical and kinesthetic development), dan Olah Rasa dan Karsa (Affective and Creativity development). Pengembangan dan implementasi pendidikan karakter perlu dilakukan dengan mengacu pada grand design tersebut.

Menurut UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 13 Ayat 1 menyebutkan bahwa Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Pendidikan informal sesungguhnya memiliki peran dan kontribusi yang sangat besar dalam keberhasilan pendidikan. Peserta didik mengikuti pendidikan di sekolah hanya sekitar 7 jam per hari, atau kurang dari 30%. Selebihnya (70%), peserta didik berada dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya. Jika dilihat dari aspek kuantitas waktu, pendidikan di sekolah berkontribusi hanya sebesar 30% terhadap hasil pendidikan peserta didik.

Selama ini, pendidikan informal terutama dalam lingkungan keluarga belum memberikan kontribusi berarti dalam mendukung pencapaian kompetensi dan pembentukan karakter peserta didik. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya kesibukan dan aktivitas kerja orang tua yang relatif tinggi, kurangnya pemahaman orang tua dalam mendidik anak di lingkungan keluarga, pengaruh pergaulan di lingkungan sekitar, dan pengaruh media elektronik. Salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui pendidikan karakter terpadu, yaitu memadukan dan mengoptimalkan kegiatan pendidikan informal lingkungan keluarga dengan pendidikan formal di sekolah. Dalam hal ini, waktu belajar

peserta didik di sekolah perlu dioptimal-kan agar peningkatan mutu hasil belajar, terutama pembentukan karakter peserta didik sesuai tujuan pendidikan dapat dicapai.

Pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada setiap mata pelajaran perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran nilai-nilai karakter tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi menyentuh pada internalisasi, dan pengamalan nyata dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di masyarakat. Kegiatan ekstra kurikuler yang selama ini diselenggarakan sekolah merupakan salah satu media yang potensial untuk pembinaan karakter dan peningkatan mutu akademik peserta didik. Kegiatan ekstra kurikuler merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah. Melalui kegiatan ekstra kurikuler diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial, serta potensi dan prestasi peserta didik.

Pendidikan karakter di sekolah juga sangat terkait dengan manajemen atau pengelolaan sekolah. Pengelolaan yang dimaksud adalah bagaimana pendidikan karakter direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan dalam kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah secara memadai. Pengelolaan tersebut meliputi nilai-nilai yang perlu

ditanamkan, muatan kurikulum, pembelajaran, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, dan komponen terkait lainnya. Dengan demikian, manajemen sekolah merupakan salah satu media yang efektif dalam pendidikan karakter di sekolah.

Pendidikan karakter seharusnya membawa peserta didik ke pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif, dan akhirnya ke pengamalan nilai secara nyata. Permasalahan pendidikan karakter yang selama ini ada di sekolah perlu segera dikaji, dan dicari alternatif-alternatif solusinya, serta perlu dikembangkannya secara lebih operasional sehingga mudah diimplementasikan di sekolah. Arti pendidikan karakter secara terintegrasi di dalam proses pembelajaran adalah pengenalan nilai-nilai, fasilitasi diperolehnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, dan penginternalisasian nilai-nilai ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran, baik yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas pada semua mata pelajaran. Dengan demikian, kegiatan pembelajaran, selain untuk menjadikan peserta didik menguasai kompetensi (materi) yang ditargetkan, juga dirancang dan dilakukan untuk menjadikan peserta didik mengenal, menyadari/peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai dan menjadikannya perilaku.

BAB IV PENDEKATAN EMPAT PILAR KEBANGSAAN DALAM KEGIATAN INTRAKURIKULER

A. Deskripsi Model Pendekatan Empat Pilar Kebangsaan dalam Kegiatan Intrakurikuler

Pendekatan integratif dan komprehensif dalam model pelaksanaan pembudayaan empat pilar kebangsaan dalam kegiatan intrakurikuler perlu dilakukan secara terencana dengan baik. Model pendekatan empat pilar kebangsaan dalam kegiatan intrakurikuler bisa digambarkan dalam model gambar 4.1 sebagai berikut.



Gambar 4.1
Pendekatan Empat Pilar Kebangsaan dalam Kegiatan
Intrakurikuler

B. Langkah-Langkah Model Pendekatan Empat Pilar Kebangsaan dalam Kegiatan Intrakurikuler

Model pendekatan empat pilar kebangsaan dilakukan secara integratif ke dalam kegiatan intrakurikuler. Pembudayaan empat pilar kebangsaan dilaksanakan dalam sebuah kegiatan belajar mengajar di kelas dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika merupakan empat pilar kebangsaan yang didalamnya memuat nilai-nilai luhur Bangsa yang telah dirumuskan oleh para pendahulu kita semenjak dahulu. Nilai-nilai tersebut kemudian dijabarkan masing-masing secara terinci sehingga nilai yang terkandung didalamnya menjadi jelas dan terarah.
2. Nilai-nilai yang terkandung didalam empat pilar kebangsaan nantinya harus terintegrasi ke dalam seluruh mata pelajaran. Setiap mata pelajaran memiliki standar kompetensi yang berisi deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu. Oleh karena itu, setiap mata pelajaran tersebut kemudian menjabarkan kompetensinya masing-masing menjadi sebuah program pembelajaran yang terstruktur.
3. Setelah masing-masing mapel dari mapel A-N menjabarkan kompetensinya, maka nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar kebangsaan tersebut dipilih dan disesuaikan nilai-nilai inti (*core value*) nya dan diintegrasikan ke dalam kompetensi mata pelajaran masing-masing.
4. *Core value* (nilai inti) yang didapat dari empat pilar tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam silabus, RPP, Bahan ajar, media, LKS (lembar kerja siswa) serta

evaluasi pada setiap mata pelajaran. Pembudayaan empat pilar kebangsaan pada akhirnya bisa ditanamkan, diimplementasikan dan dikembangkan secara terstruktur menjadi sebuah perangkat pembelajaran dan siap diimplementasikan ke dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas.

C. Model Pendekatan dalam Pembelajaran

Pada konteks mikro, pembudayaan empat pilar berlangsung dalam konteks satuan pendidikan atau sekolah secara holistik (*the whole school reform*). Model pendekatan empat pilar kebangsaan dalam intrakurikuler bisa disusun sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan empat Pilar Kebangsaan dalam Standar Kompetensi Lulusan (SKL) SMP

Substansi nilai-nilai empat pilar kebangsaan yang ada pada SKL SMP/MTs/SMPLB/Paket B. Adapun substansi nilai-nilai empat pilar kebangsaan dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Substansi Nilai-Nilai Empat Pilar Kebangsaan Pada SKL SMP/MTs/SMPLB/Paket B

No.	Rumusan SKL	Empat Pilar	Nilai/Karakter
1	Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan remaja	Pancasila, UUD 1945	Iman dan taqwa
2	Menunjukkan sikap percaya diri	Pancasila, UUD 1945	Adil
3	Mematuhi aturan-aturan	Pancasila, UUD	Disiplin

No.	Rumusan SKL	Empat Pilar	Nilai/Karakter
	sosial yang berlaku dalam lingkungan yang lebih luas	1945, Binneka Tunggl Ika, NKRI	
4	Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup nasional	Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI	nasionalistik
5	Mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan sumber-sumber lain secara logis, kritis, dan kreatif	Pancasila, UUD 1945 Bhinneka Tunggal Ika, NKRI	Bernalar, kreatif
6	Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif	Pancasila, UUD 1945 Bhinneka Tunggal Ika, NKRI	bernalar, kreatif
7	Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya	Pancasila, UUD 1945	Gigih, tanggung jawab
8	Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari	Pancasila, UUD 1 Bhinneka Tunggal Ika, NKRI 45,	Bernalar
9	Mendeskrpsi gejala alam dan sosial	Pancasila, UUD 1 Bhinneka Tunggal I Bhinneka Tunggal Ika, NKRI ka, NKRI 945,	Terbuka, bernalar
10	Memanfaatkan lingkungan	Pancasila, UUD	Tanggung

No.	Rumusan SKL	Empat Pilar	Nilai/Karakter
	secara bertanggung jawab	1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI	jawab
11	Menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI	Nasionalistik, gotong royong
12	Menghargai karya seni dan budaya nasional	Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI	Peduli, nasionalistik
13	Menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk berkarya	Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI	Tanggung jawab, kreatif
14	Menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang	Pancasila, UUD 1945	Bersih dan sehat
15	Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun	Pancasila, UUD 1945	Santun, bernalar
16	Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat	Pancasila, UUD 1945	Terbuka, Tanggung jawab
17	Menghargai adanya perbedaan pendapat	Pancasila, UUD 1945	Terbuka, adil
18	Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis naskah pendek sederhana	Pancasila, UUD 1945	Gigih, kreatif

No.	Rumusan SKL	Empat Pilar	Nilai/Karakter
19	Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sederhana	Pancasila, UUD 1945	Gigih, kreatif
20	Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan menengah	Pancasila, UUD 1945	Bervisi, bernalar

Berdasarkan hal di atas, maka rumusan SKL (Standart Kompetensi lulusan) diupayakan untuk diintegrasikan bersama dengan nilai-nilai empat pilar kebangsaan yang ada, meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Proses pengintegrasian tersebut dilaksanakan dalam sebuah proses pembelajaran di kelas.

2. Integrasi dalam kegiatan belajar mengajar di kelas

Pembudayaan empat pilar kebangsaan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan terintegasi dalam semua mata pelajaran (*embeded approach*), khususnya untuk mata pelajaran PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) atau PPKn dan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial). Untuk kedua mata pelajaran tersebut pembudayaan empat pilar kebangsaan dapat dikembangkan sebagai dampak dari sebuah pembelajaran (*instructional effects*) dan juga dampak pengiring (*nurturant effects*). Sementara itu untuk

mata pelajaran lainnya, yang secara formal memiliki misi utama selain pembudayaan empat pilar kebangsaan tersebut, wajib dikembangkan kegiatan pembelajaran yang memiliki dampak pengiring (*nurturant effects*) berkembangnya budaya empat pilar kebangsaan dalam diri peserta didik.

Seperti diketahui bahwa pembelajaran IPS sendiri adalah untuk membina peserta didik menjadi warga negara yang mampu mengambil keputusan secara demokratis dan rasional yang dapat diterima oleh semua golongan yang ada di dalam masyarakat. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan mata pelajaran yang mengkaji tentang isu-isu sosial dengan unsur kajiannya dalam konteks peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi. Tema yang dikaji dalam IPS adalah fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat baik masa lalu, masa sekarang, dan kecenderungannya di masa-masa mendatang. Pada jenjang SMP/MTs, mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diharapkan dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai.

Adapun rincian tujuan mata pelajaran IPS adalah agar peserta didik memiliki kemampuan :

1. Mengetahui konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya.
2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial.
3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat, lokal, nasional, dan global.

Sedangkan ruang lingkup materi pembelajaran IPS untuk jenjang SMP/MTs adalah meliputi 1). Keruangan dan konektivitas antar ruang dan waktu, 2). Perubahan masyarakat Indonesia pada zaman praaksara, zaman Hindu-Buddha dan zaman Islam, zaman penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan, masa pergerakan kemerdekaan sampai dengan awal reformasi; 3). Jenis dan fungsi kelembagaan sosial, budaya, ekonomi dan politik dalam masyarakat; serta 4). Interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Dari ruang lingkup materi inilah maka dapat dipilih materi-materi yang sesuai untuk pengembangan empat pilar kebangsaan pada saat proses pembelajaran.

Disisi lain, pembelajaran selain IPS yang tidak kalah penting adalah pembelajaran PPKn. Sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 penjelasan pasal 77 J ayat (1) huruf ditegaskan bahwa Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk Peserta Didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara umum tujuan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN dalam Kurikulum 2013 pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah mengembangkan potensi

peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni: (1) sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan (*civic confidence, civic committment, and civic responsibility*); (2) pengetahuan kewarganegaraan; (3) keterampilan kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (*civic competence and civic responsibility*).

Secara khusus Tujuan PPKn dalam Kurikulum 2013 yang berisikan keseluruhan dimensi tersebut sehingga peserta didik mampu:

- 1) menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial;
- 2) memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif dan pemahaman utuh tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif serta memiliki semangat kebangsaan serta cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
- 4) berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial Budaya.

Ruang lingkup PPKn dalam Kurikulum 2013 meliputi:

- 1) Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa
- 2) UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- 3) Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kesepakatan final bentuk Negara Republik Indonesia
- 4) Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud filosofi kesatuan yang melandasi dan mewarnai keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Proses pembelajaran PPKn di kelas membutuhkan waktu dan sarana prasarana yang memadai agar hakikat dan tujuan pembelajaran tercapai. Pembelajaran dimaksudkan agar tercipta kesadaran sebagai warga negara (*civic literacy*), yaitu komunikasi sosial kultural kewarganegaraan (*civic engagement*), Kemampuan berpartisipasi sebagai warga negara (*civic skill and participation*), Penalaran kewarganegaraan (*civic knowledge*), Partisipasi kewarganegaraan secara bertanggung jawab (*civic participation and civic responsibility*). Salah satu pertimbangan PPKn berubah kembali menjadi PPKn adalah karena pada pada kurikulum 2006, Pancasila tidak dimunculkan secara eksplisit sehingga (seolah) hilang dalam Kurikulum PKN walau ada pokok bahasa yang khusus membahas tentang Pancasila, hanya porsinya sedikit.

Masuknya kembali Pancasila sebagai bagian dari perubahan mata pelajaran PKN menjadi PPKn adalah

sebagai bagian dari penguatan 4 (empat) pilar kebangsaan yang meliputi: Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Keempat pilar tersebut saling terkait antara satu dengan yang lain, dan kesemuanya dijiwai oleh Pancasila. Jika dianalisis Kompetensi Dasar PPKn 2013 jenjang SD, SMP, dan SMA, maka guru PPKn dituntut untuk mampu mengembangkan pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran. Pendekatan pembelajaran digambarkan sebagai kerangka umum tentang skenario yang digunakan guru untuk membelajarkan siswa, dalam rangka mencapai suatu tujuan pembelajaran.

Model pendekatan pembelajaran terbagi menjadi dua. Pertama pendekatan pembelajaran berpusat kepada guru (*teacher centered*), dan kedua pendekatan pembelajaran berpusat kepada siswa (*student centered*). Strategi adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran, sehingga akan memudahkan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Dapat juga diartikan sebagai suatu rencana untuk mencapai tujuan. Terdiri dari metode, teknik, dan prosedur. Sedangkan metode adalah Cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka guru PPKn dituntut untuk mampu mengembangkan proses pembelajaran supaya lebih menarik, menyenangkan, menantang, dan membentuk peserta didik untuk mampu berpikir kritis dan konstruktif. Guru PPKn harus mampu menyajikan materi pembelajaran secara kontekstual, mengaitkan materi pelajaran dengan kondisi nyata di lapangan

Mengaitkan antara teori dengan praktik, antara harapan dan kenyataan, mengidentifikasi masalah yang terjadi, dan mendorong peserta didik untuk memunculkan alternatif pemecahan masalah.

Alternatif metode yang cocok untuk mewujudkan hal tersebut di atas, guru PPKn bisa menggunakan metode ceramah, diskusi, observasi, simulasi, inquiry, bermain peran, studi kasus, kunjungan lapangan, penugasan, proyek, debat, portofolio, atau metode lainnya yang dinilai relevan. Apa pun metode yang digunakan, yang penting bisa memberikan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan warga negara serta internalisasi karakter kewarganegaraan kepada peserta didik. Mata pelajaran PPKn yang dikemas secara menarik akan membuat peserta didik menyenangkannya, merasa perlu, tidak menjadi beban, dan merasakan manfaat setelah mempelajarinya. Selain akan mengubah pandangan bahwa mata pelajaran PPKn membosankan karena menurut penulis, penilaian bahwa suatu mata pelajaran membosankan atau tidak dipengaruhi oleh minat peserta didik, juga dipengaruhi oleh cara guru menyampaikannya.

3. Pengembangan budaya empat pilar diintegrasikan dalam setiap pokok bahasan dari setiap mata pelajaran

Nilai-nilai yang terkandung di dalam empat pilar kebangsaan tersebut dicantumkan dalam Silabus dan Rencana Program Pembelajaran (RPP). Pengembangan budaya empat pilar tersebut dalam Silabus ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut:

- 1) Mengkaji Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) untuk menentukan apakah kandungan

nilai-nilai dan karakter dalam empat pilar secara tersirat atau tersurat dalam SK dan KD sudah tercakup di dalamnya

- 2) Menggunakan tabel 4.1 yang memperlihatkan keterkaitan antara SK/KD dengan nilai dan indikator untuk menentukan nilai empat pilar kebangsaan yang akan dikembangkan
- 3) Mencantumkan nilai-nilai dan karakter empat pilar bangsa dalam tabel 4.1 ke dalam silabus
- 4) Mencantumkan nilai-nilai empat pilar yang sudah tercantum dalam silabus ke RPP
- 5) Mengembangkan proses pembelajaran peserta didik aktif yang memungkinkan peserta didik memiliki kesempatan melakukan internalisasi nilai dan menunjukkannya dalam perilaku yang sesuai.
- 6) Memberikan bantuan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan untuk internalisasi nilai mau pun untuk menunjukkannya dalam perilaku.
- 7) Melakukan assesmen atau penilaian terhadap proses pembelajaran yang telah berlangsung, khususnya penilaian mengenai penerapan dan pengembangan empat pilar kebangsaan pada diri siswa.

Tahapan di atas merupakan gambaran yang dapat dijadikan contoh dalam penerapan dan pengembangan penanaman empat pilar kebangsaan oleh guru di kelas. Tentu saja hal tersebut tetap membutuhkan peran serta siswa untuk pemahaman nilai-nilai empat pilar kebangsaan.

4. Hubungan nilai-nilai empat pilar dengan mata pelajaran harus saling melengkapi

Pengembangan pembudayaan empat pilar kebangsaan berupa Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika maka seharusnya mata pelajaran dipahami sebagai pesan dan alat (*as medium and message*). Artinya, mata pelajaran sebagai wahana pembudayaan dan pemberdayaan individu. Misalnya Guru Sains harus menyadari bahwa pembahasan materi Sains diarahkan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami fenomena alam dari sudut pandang teori Fisika, Biologi dan Kimia. Menggali berbagai sumber informasi dan menganalisisnya untuk menyempurnakan pemahaman tersebut, mengkomunikasikan pemahaman tersebut kepada orang lain, dan memahami bahwa fenomena seperti itu tidak lepas dari "peran" Sang Pencipta (Pancasila).

Pengembangan nilai karakter seperti itu dapat dilakukan melalui metoda pembelajaran yang dipilih guru. Misalnya, untuk mengembangkan kecakapan berkomunikasi, guru dapat memilih metoda diskusi atau siswa diminta presentasi. Untuk mengembangkan kecakapan bekerja sama, disiplin, kerja kelompok dalam praktikum dapat diterapkan. Yang penting adalah bahwa aspek-aspek tersebut sengaja dirancang dan dinilai hasilnya sebagai bentuk hasil belajar pembudayaan nilai empat pilar.

Ada banyak cara mengintegrasikan nilai-nilai empat pilar ke dalam mata pelajaran, antara lain dengan mengungkapkan nilai-nilai yang ada dalam mata pelajaran, pengintegrasian langsung di mana

nilai-nilai empat pilar menjadi bagian terpadu dari mata pelajaran, menggunakan perumpamaan dan membuat perbandingan dengan kejadian-kejadian serupa dalam hidup para siswa, mengubah hal-hal negatif menjadi nilai positif, mengungkapkan nilai-nilai melalui diskusi dan *brainstroming*, menggunakan cerita untuk memunculkan nilai-nilai, menceritakan kisah hidup orang-orang besar, menggunakan lagu-lagu dan musik untuk mengintegrasikan nilai-nilai, menggunakan drama untuk melukiskan kejadian-kejadian yang berisikan nilai-nilai, menggunakan berbagai kegiatan seperti kegiatan pelayanan, *field trip* dan klub-klub atau kelompok kegiatan untuk memunculkan nilai-nilai kemanusiaan.

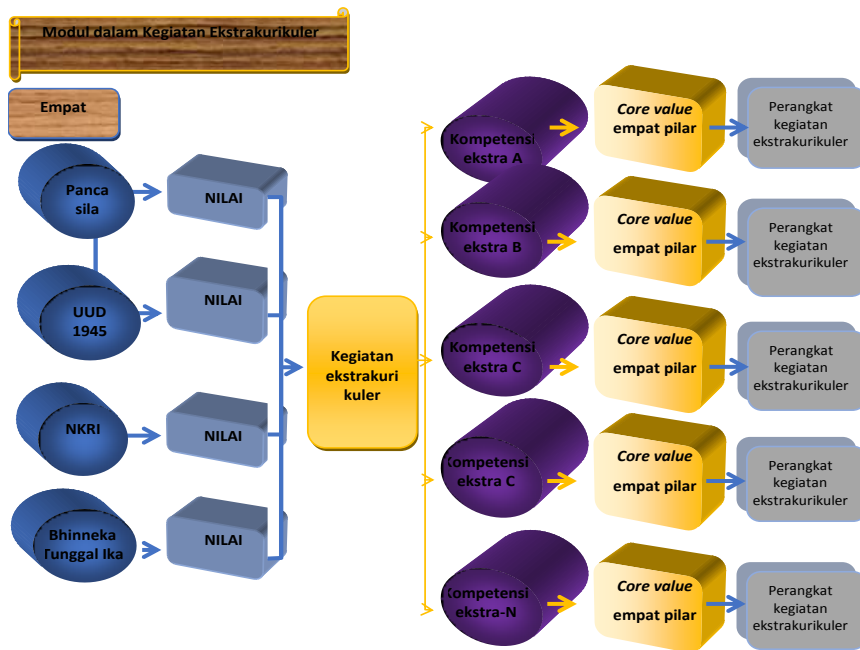
Seiring hal tersebut maka guru dituntut untuk mampu mengembangkan proses pembelajaran supaya lebih menarik, menyenangkan, menantang, dan membentuk peserta didik untuk mampu berpikir kritis dan konstruktif. Guru harus mampu menyajikan materi pembelajaran secara kontekstual, mengaitkan materi pelajaran dengan kondisi nyata di lapangan Mengaitkan antara teori dengan praktek, antara harapan dan kenyataan, mengidentifikasi masalah yang terjadi, dan mendorong peserta didik untuk memunculkan alternatif pemecahan masalah.

BAB V

PENDEKATAN EMPAT PILAR KEBANGSAAN DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

A. Deskripsi Model Pendekatan Empat Pilar Kebangsaan dalam Kegiatan Ekstrakurikuler

Pendekatan integratif dan komprehensif dalam model pelaksanaan pembudayaan empat pilar kebangsaan dalam kegiatan ekstrakurikuler perlu dilakukan secara terencana dengan baik. Pengintegrasian pendekatan empat pilar ke dalam kegiatan ekstrakurikuler bisa dituangkan dalam gambar diagram 5.1 sebagai berikut.



Gambar 5.1
Pendekatan Empat Pilar Kebangsaan dalam Kegiatan Ekstrakurikuler

B. Langkah-Langkah Pengintegrasian Empat Pilar dalam Ekstrakurikuler

Berdasarkan gambar 5.1, model pendekatan empat pilar kebangsaan dilakukan secara integratif ke dalam kegiatan ekstrakurikuler, yaitu melalui kegiatan tambahan penyaluran minat dan bakat siswa dan bisa dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Empat pilar kebangsaan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika memiliki nilai-nilai yang harus dijabarkan masing-masing. Nilai-nilai inilah yang nantinya akan menjadi pijakan dan landasan penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.
2. Penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar kebangsaan nantinya harus terintegrasi ke dalam seluruh kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan di sekolah..
3. Setiap kegiatan ekstrakurikuler memuat kompetensi yang akan dicapai masing-masing kegiatan dan menjabarkan kompetensinya masing-masing menjadi sebuah program yang terstruktur.
4. Setelah masing-masing kegiatan ekstrakurikuler dari A-N menjabarkan kompetensinya, maka nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar kebangsaan tersebut dipilih dan disesuaikan nilai-nilai inti (*core value*) nya dan diintegrasikan ke dalam kompetensi masing-masing kegiatan ekstrakurikuler.
5. *Core value* (nilai inti) yang didapat dari empat pilar tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam perangkat kegiatan ekstrakurikuler. Pembudayaan empat pilar kebangsaan pada akhirnya bisa ditanamkan, diimplementasikan dan dikembangkan secara terstruktur menjadi sebuah perangkat kegiatan.

C. Bentuk Kegiatan Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan diluar kelas yang diselenggarakan sebagai program untuk mewadahi dan menggali bakat serta minat siswa. Pembudayaan empat pilar kebangsaan dalam kegiatan ekstrakurikuler bisa dilakukan seperti contoh berikut.

1. Paskibra/Pasukan Pengibar Bendera

Paskibra merupakan pasukan pengibar bendera yang tidak bertugas sebagai pengibar bendera pusaka di tingkat kota, provinsi, dan nasional, namun hanya bertugas di sekolah. Paskibra merupakan anggota yang mengikuti ekstra kurikuler Paskibra di sekolah tetapi tidak diutus untuk menjadi Paskibraka, anggota Paskibra yang telah mengikuti seleksi Paskibraka tetapi tidak lolos, dan/atau anggota yang mengikuti perlombaan baris-berbaris paskibra yang tidak diutus menjadi Paskibraka.

Adapun tujuan dan manfaat kegiatan ekstrakurikuler Pakibra yaitu sebagai berikut.

1. Menghimpun dan membina para anggota agar menjadi siswa-siswi melatih dan warga Negara Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, setia dan patuh pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mengamalkan dan mengamankan Pancasila
3. Membina watak, kemandirian dan profesionalisme, memlihara dan meningkatkan rasa persaudaraan, kekeluargaan, persatuan dan kesatuan, mewujudkan kerjasama yang utuh serta jiwa pengabdian kepada bangsa dan negara, memupuk rasa tanggungjawab dan daya cipta yang dinamis

serta kesadaran nasional di kalangan para anggota dan keluarganya.

4. Membentuk manusia Indonesia yang memiliki ketahanan mental (tangguh), cukup pengetahuan dan kemahiran tekhnis untuk dapat melaksanakan pekerjaannya (tanggap) serta daya tahan fisik/jasmani (tangkas).

Semua kegiatan yang terangkum dalam kegiatan Paskibra secara keseluruhan telah memuat nilai empat pilar kebangsaan. Pelatih (*Coach*) memegang peran penting untuk mengarahkan kegiatan Paskibra bisa terlaksana sesuai tujuan.



*Gambar 5.2: Pasukan Paskibra
Sumber: Kompas Internasional*

2. PKS/Patroli Keamanan Sekolah

Patroli Keamanan Sekolah atau dapat disingkat PKS adalah salah satu jenis kegiatan ekstrakurikuler yang umum ditemui di sekolah-sekolah di Indonesia yang dibentuk 5 Mei 1965. PKS adalah singkatan dari Patroli Keamanan Sekolah jika kita mendengar kata Patroli, tentunya kita teringat tugas-tugas pengawasan

daerah sesuai dengan perincian tugas yang dibebankannya, Misalnya Patroli Jalan Raya (PJR) adalah patroli Polisi Lalu Lintas yang tugasnya mengadakan pengawasan keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas sepanjang jalan tersebut. Begitu pula PKS tidak jauh beda tugasnya dengan PJR tetapi yang membedakannya adalah ruang lingkup tugasnya, PJR bertugas di sepanjang jalan raya sedangkan PKS di lingkungan sekolah serta jalan menuju ke sekolah.

PKS merupakan bagian kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan di sekolah dengan tugas untuk menjaga keamanan sekolah. Tugas PKS adalah mengatur lalu lintas di lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar sekolah, terutama pada saat menyeberangkan siswa-siswi yang akan menuju ke sekolah maupun yang akan meninggalkan sekolah. PKS juga dapat bertugas di tempat-tempat lain yang sedang melaksanakan kegiatan sekolah, umpamanya pada saat kegiatan Porseni, menyambut perayaan hari-hari besar dan kegiatan lainnya. Walaupun semata-mata PKS bertugas untuk kawan-kawan sesekolahnya, dibenarkan juga kalau mereka melaksanakan tugasnya terhadap pemakai jalan lain, seperti menyeberangkan siswa-siswi dari sekolah lain. Orang lanjut usia atau siapa saja yang ada di tempat itu dan memerlukan pertolongan, bahkan anggota PKS pun bisa membantu tugas para Polisi yang ada di jalan.

Secara umum tujuan utama kegiatan ini diantaranya adalah:

- 1) Segala usaha kegiatan untuk melindungi dan mengamankan lingkungan intern sekolah guna mendukung proses belajar mengajar.

- 2) Segala usaha dan kegiatan untuk melindungi dan mengamankan pemakai jalan sebagai pejalan kaki khususnya para pelajar pada waktu menyeberang jalan di sekitar sekolah masing-masing.
- 3) Membantu Kepala Sekolah/Guru di sekolah dalam bidang keamanan dan ketertiban di lingkungan intern sekolah masing-masing sehingga terwujud ketentraman yang dinamis antar siswa-siswi dan guru pengajar guna mendukung proses belajar mengajar.

Semua kegiatan yang terangkum dalam kegiatan PKS secara keseluruhan juga telah memuat nilai empat pilar kebangsaan. Pelatih (*Coach*) memegang peran penting untuk mengarahkan kegiatan PKS bisa terlaksana dan selaras dengan nilai empat pilar tersebut.

Tanda Sahnya Sebagai Anggota PKS harus melewati masa pendidikan minimal 12 kali masa latihan (3 bulan). Para siswa yang dinyatakan lulus akan dilantik oleh inspektur upacara pada saat penutupan yang dimaksud inspektur upacara adalah gubernur atau kapolda atau yang mewakili. Pada waktu pelantikan setelah salah satu dari peserta didik mendapatkan penyematan tanda PKS (lencana) dan diterimanya kelengkapan lainnya serta piagam tanda lulus maka semua anggota yang mengikuti kegiatan pendidikan telah sah menjadi anggota PKS. Keanggotaan ini akan batal atau berakhir pada waktu yang bersangkutan telah pindah ke lain daerah atau telah lulus dari sekolahnya dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.



*Gambar 5.3: Patroli Kemanana Sekolah
Sumber: ANTARA foto*

3. PMR/Palang Merah Remaja

Palang Merah Remaja merupakan suatu organisasi binaan dari Palang Merah Indonesia yang berpusat di sekolah-sekolah ataupun kelompok-kelompok masyarakat (sanggar, kelompok belajar, dll.) serta bertujuan membangun dan mengembangkan karakter Kepalangmerahan agar siap menjadi Relawan PMI pada masa depan. Bersih, Sehat, Kepemimpinan, Peduli, Kreatif, Kerja sama, Bersahabat dan Ceria merupakan karakter yang harus dimiliki oleh anggota PMR.

Setiap anggota PMR harus menerima pelatihan sebelum terlibat dalam kegiatan Tri Bhakti PMR. Proses pelatihan dapat dilakukan oleh PMI Kota/Kabupaten dan Satuan PMR dengan waktu dan kurikulum yang telah disesuaikan dengan kalender pendidikan. Waktu juga menyesuaikan dan terintegrasi

dengan kegiatan tertentu, sesuai kesepakatan antara PMI Kota/Kabupaten, fasilitator/pelatih, dan anggota PMR. Setiap sesi pelatihan akan memperkuat karakter (kualitas positif) anggota PMR untuk meningkatkan keterampilan hidup sehat dan menjadi calon relawan, anggota PMR tidak hanya tahu dan terampil, tetapi juga perlu memahami dan menerapkan apa yang telah mereka pelajari, dalam proses pelatihan.

Cakupan materi yang harus diberikan antara lain sejarah, lambang, kegiatan kepalangmerahan dan penyebaran prinsip-prinsip dasar gerakan palang merah sedangkan isi Tri Bhakti PMR adalah :

- 1) Meningkatkan keterampilan hidup sehat.
- 2) Pekerjaan dan ibadah di masyarakat.
- 3) Memperkuat persahabatan nasional dan internasional.

Dalam PMR diperkenalkan 7 Prinsip yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh masing-masing anggotanya. Prinsip-prinsip ini dikenal sebagai “tujuh Prinsip Dasar Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (Tujuh Prinsip Dasar Palang Merah dan Bulan Sabit Merah). Diantaranya prinsip Kemanusiaan, Kesamaan, Kenetralan, Otonomi, Kesukarelawanan, Kesatuan, Keseluruhan.

Tri Bhakti dan 7 prinsip PMR telah memuat nilai-nilai empat pilar kebangsaan namun perlu juga dicantumkan dan dikukuhkan nilai empat pilar tersebut sehingga pengintegrasian semakin jelas. Oleh karena itu, setiap pelatih harus bisa membuat kurikulum dan kerangka acuan kerja berdasarkan empat pilar yang bisa diimplementasikan ke dalam kegiatan PMR.



Gambar 5.4: Logo PMR

Sumber: Wikipedia.id.

4. Pramuka

Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kata "*Pramuka*" merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang memiliki arti Jiwa Muda yang Suka Berkarya. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan, yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat, dan bangsa Indonesia.

Anggota Gerakan Pramuka terdiri dari Anggota Muda, dan Anggota Dewasa. Anggota Muda adalah Peserta Didik Gerakan Pramuka yang dibagi menjadi beberapa golongan di antaranya:

- a. Golongan Siaga merupakan anggota yang berusia 7 s.d. 10 tahun
- b. Golongan Penggalang merupakan anggota yang berusia 11 s.d. 15 tahun
- c. Golongan Penegak merupakan anggota yang berusia 16 s.d. 20 tahun
- d. Golongan Pandega merupakan anggota yang berusia 21 s.d. 25 tahun

Sedangkan tujuan Pramuka diantaranya adalah:

- 1) Memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani, dan rohani;
- 2) Menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia, dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi anggota masyarakat yang baik, dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa, dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup, dan alam lingkungan.

Gerakan Pramuka juga berlandaskan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

- 1) Iman, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Peduli terhadap bangsa, dan tanah air, sesama hidup, dan alam seisinya.

- 3) Peduli terhadap dirinya pribadi.
- 4) Taat kepada Kode Kehormatan Pramuka.

Tujuan dan Prinsip yang termuat dalam kegiatan Pramuka sebagian besar juga telah berisikan empat pilar kebangsaan, namun pelatih perlu mencantumkan dan mengukuhkan nilai empat pilar tersebut sehingga pengintegrasian semakin jelas. Oleh karena itu, setiap pelatih harus bisa membuat kurikulum dan kerangka acuan kerja berdasarkan empat pilar yang bisa diimplementasikan ke dalam kegiatan Pramuka. Metode Kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui:

- a. Pengamalan Kode Kehormatan Pramuka.
- b. Belajar sambil melakukan.
- c. Kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi.
- d. Kegiatan yang menarik, dan menantang.
- e. Kegiatan di alam terbuka.
- f. Kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan.
- g. Penghargaan berupa tanda kecakapan.
- h. Satuan terpisah antara putra, dan putri.

Kegiatan di atas hanyalah sebuah contoh kegiatan ekstrakurikuler yang bisa diselenggarakan oleh sekolah dengan tujuan serta prinsip penyelenggaraannya telah mengintegrasikan nilai empat pilar kebangsaan. Kegiatan ekstrakurikuler lainnya seperti Organisasi Islam, Mading (majalah dinding), Olahraga, Teater seni, English Club, KIR dan ekstrakurikuler lainnya juga perlu membuat kurikulum dengan tujuan dan Kerangka Acuan Kerja membudayakan empat pilar kebangsaan.



*Gambar 5.5: Gerakan Pramuka
Sumber: Kabar Serasan*

Setiap Kegiatan yang diselenggarakan dalam kegiatan ekstrakurikuler harus disertai pemahaman akan dasar-dasar filosofisnya, sehingga anak didik akan mengerjakan berbagai macam kegiatan dengan kesadaran dan keterpanggilan. Setiap kegiatan mengandung unsur-unsur empat pilar kebangsaan, sebagai contoh dalam kegiatan kepramukaan, terdapat pendidikan kesederhanaan, kemandirian, kesetiakawanan dan kebersamaan, kecintaan pada lingkungan dan kepemimpinan. Dalam kegiatan olahraga terdapat pendidikan kesehatan jasmani, penanaman sportivitas, kerja sama (*team work*) dan kegigihan untuk berusaha. Unsur-unsur nilai dalam kegiatan kemudian akan dijelaskan dan diintegrasikan ke dalam empat pilar, sehingga peserta didik akan memahami makna kegiatan yang dilakukan sesuai dengan nilai empat pilar kebangsaan.

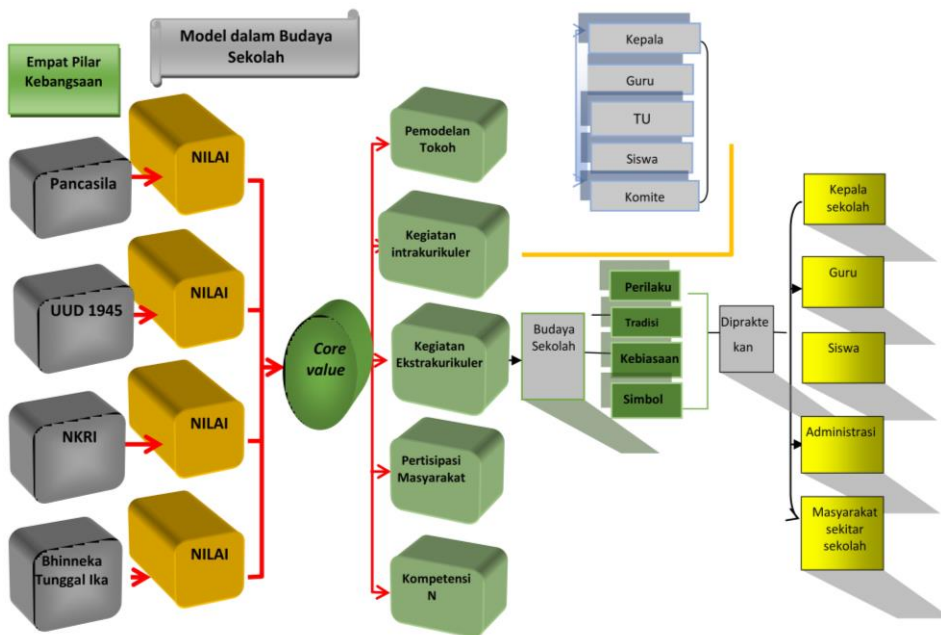
Pengaturan kegiatan di sekolah ditangani oleh organisasi pelajar yang terbagi dalam banyak bagian, seperti Ketua, Sekretaris, Bendahara, Keamanan, Pengajaran, Penerangan, Koperasi Pelajar, Koperasi Dapur, Kantin Pelajar, Bersih Lingkungan, Pertamanan, Kesenian, Ketrampilan, Olahraga, Penggerak Bahasal. Kegiatan kepramukaan juga ditangani oleh Koordinator Gerakan Pramuka dengan beberapa andalan; Ketua Koordinator Kepramukaan, Andalan Koordinator Urusan Kesekretariatan, Andalan Koordinator Urusan Keuangan, Andalan Koordinator Urusan Latihan, Andalan Koordinator Urusan Perpustakaan, Andalan Koordinator Urusan Perlengkapan, Andalan Koordinator Urusan Kedai Pramuka, dan Pembina gugusdepan. Pendidikan organisasi ini sekaligus untuk kaderisasi kepemimpinan melalui pendidikan *self government*.

BAB VI

PENGEMBANGAN PEMBUDAYAAN EMPAT PILAR KEBANGSAAN MELALUI BUDAYA SEKOLAH

A. Deskripsi Model Pendekatan Empat Pilar Kebangsaan melalui Budaya Sekolah

Pendekatan integratif dan komprehensif dalam model pelaksanaan pembudayaan empat pilar kebangsaan melalui budaya sekolah dilakukan secara terencana dengan baik. Pengintegrasian pendekatan empat pilar kedalam Budaya Sekolah bisa dituangkan ke dalam gambar diagram 6.1 sebagai berikut.



Gambar 6.1

Pendekatan Empat Pilar Kebangsaan melalui Budaya Sekolah

B. Langkah-Langkah Pembudayaan Empat Pilar Kebangsaan melalui Budaya Sekolah

Berdasarkan gambar 6.1, model pendekatan empat pilar kebangsaan dilakukan secara integratif ke dalam budaya sekolah. Budaya sekolah menjadi sarana yang dianggap sangat efektif untuk membudayakan empat pilar kebangsaan dan bisa dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Empat pilar kebangsaan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika memiliki nilai-nilai yang harus dijabarkan masing-masing. Nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar kebangsaan tersebut kemudian diambil nilai inti (*core value*) yang disesuaikan dengan budaya sekolah maupun yang akan dikembangkan menjadi sebuah budaya oleh sekolah.
2. Nilai-nilai inti (*core value*) ini nantinya harus tercermin dalam bentuk pemodelan tokoh, kegiatan intrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, partisipasi masyarakat dan muncul dalam sebuah kompetensi baru (N) yang harus dicapai oleh semua yang terlibat dalam kebijakan sekolah.
3. Pemodelan tokoh bisa diambil dari pihak dalam sekolah seperti kepala sekolah, guru, TU, siswa maupun dari komite sekolah. Pemodelan tokoh ini dinilai efektif karena menjadi orang yang secara langsung bisa memberi contoh dan mengajarkan bagaimana budaya empat pilar kebangsaan tersebut bisa diimplementasikan secara nyata dalam lingkungan sekolah.
4. Ketika tokoh, kegiatan intrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler serta kompetensi sekolah telah terarahkan dan terintegrasikan oleh nilai-nilai empat pilar kebangsaan, maka implementasi nilai-nilai

empat pilar kebangsaan akan menjadi sebuah budaya sekolah yang harus tercermin dalam perilaku, tradisi, kebiasaan dan simbol dalam lingkungan sekolah.

Nilai-nilai empat pilar kebangsaan yang disepakati tersebut akan menjadi budaya sekolah dan harus dipraktekkan oleh seluruh komponen sekolah baik kepala sekolah, guru, siswa, tenaga administrasi maupun oleh masyarakat sekitar dengan harapan pembudayaan empat pilar ini bisa terus terlaksana secara efektif dan berkelanjutan. Ketika nilai-nilai empat pilar kebangsaan telah menjadi budaya dalam sebuah sekolah, maka akan sangat mudah membudayakannya ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara skala luas sehingga mampu membangun nasionalisme generasi muda.

C. Strategi Pembudayaan di Sekolah

Proses yang efektif untuk pembudayaan empat pilar melalui budaya sekolah yang unggul adalah dengan melibatkan dan mengajak semua pihak atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama memberikan komitmennya. Keyakinan utama dari pihak sekolah harus difokuskan pada usaha menyemaikan dan menanamkan keyakinan, nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan yang merupakan harapan setiap pemangku kepentingan tersebut. Untuk itu, pimpinan sekolah, para guru, dan karyawan, harus fokus pada usaha pengorganisasian yang mengarah pada harapan di atas dengan cara sebagai berikut.

1. Pertama, mendefinisikan peran yang harus dimainkan oleh pimpinan sekolah, guru, dan komunitas sekolah melalui komunikasi yang terbuka dan kegiatan-kegiatan akademik yang dapat memberikan layanan

terbaik terhadap harapan dan kebutuhan komunitas sekolah tertentu (siswa).

2. Kedua, menyusun mekanisme komunikasi yang efektif, seperti misalnya dengan melakukan pertemuan rutin (mingguan atau bulanan) di antara pimpinan sekolah, guru, dan karyawan; pihak sekolah dengan mitra, seperti dengan perguruan tinggi atau organisasi profesi tertentu; pihak sekolah dengan orang tua/wali; dan pihak sekolah dengan pemerintah.
3. Ketiga, melakukan kajian bersama untuk mencapai keberhasilan sekolah, misalnya melalui pertemuan dengan sekolah-sekolah tertentu yang telah berhasil atau sekolah unggulan, atau dengan melakukan studi banding.
4. Keempat, melakukan visualisasi visi dan misi sekolah, keyakinan, nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan yang diharapkan sekolah. Visualisasi tersebut diharapkan dapat dipublikasikan agar menjadi pedoman bagi seluruh warga sekolah.
5. Kelima, memberikan pelatihan-pelatihan atau memberikan kesempatan kepada semua komponen sekolah untuk mengikuti berbagai pelatihan atau pengembangan diri, yang mendukung terwujudnya budaya sekolah yang diharapkan.

Selain lima hal yang sudah disebutkan di atas, terdapat lima unsur pembudayaan nilai empat pilar dalam budaya sekolah yang hendaknya ditanamkan di lingkungan sekolah. Kelima unsur tersebut adalah sebagai berikut.

- a. **Pertama:** kepala sekolah hendaknya memperlihatkan kepemimpinan moral akademik dengan cara;

- 1) Mengartikulasikan visi dan misi sekolah secara jelas dengan mengintegrasikan empat pilar ke dalamnya.
 - 2) Memperkenalkan semua warga sekolah dengan tujuan-tujuan membudayakan empat pilar yang ingin dicapai dan strategi pencapaiannya serta penilaian terhadap tujuan-tujuan tersebut.
 - 3) Meminta dukungan dan partisipasi para orang tua/wali siswa untuk pembudayaan empat pilar.
 - 4) Memodelkan budaya empat pilar ke dalam nilai-nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan sekolah melalui interaksi dengan para guru, karyawan, siswa, dan orang tua/wali siswa.
- b. **Kedua:** pihak sekolah membuat aturan-aturan atau disiplin sekolah dalam rangka membudayakan empat pilar (nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan) yang efektif dengan cara:
- 1) Mendefinisikan empat pilar kebangsaan ke dalam semua nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan secara jelas dan memperkuatnya.
 - 2) Mengatasi masalah-masalah perilaku siswa yang bertentangan dengan empat pilar (nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan) dengan cara yang dapat membantu perkembangan moral mereka.
 - 3) Memberikan jaminan bahwa budaya empat pilar yang terangkum dalam bentuk nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan yang ditetapkan pihak sekolah akan ditegakkan sepenuhnya di lingkungan sekolah dan dengan segera akan menghentikan semua perilaku yang menyimpang.

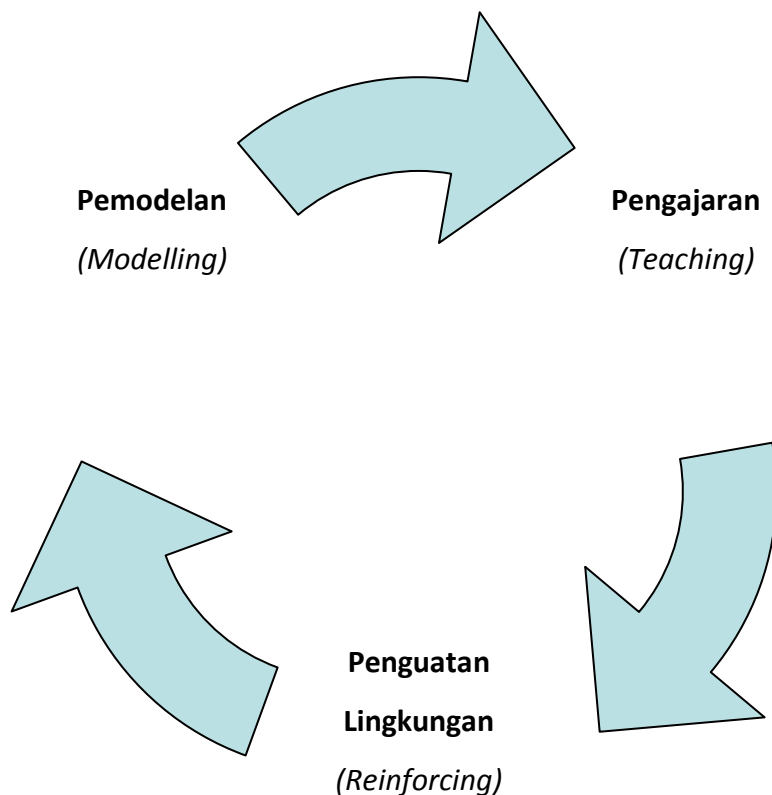
- c. **Ketiga:** pihak sekolah menciptakan suasana lingkungan sekolah dengan budaya empat pilat yang nyaman dengan cara;
- 1) Mendorong semua warga sekolah untuk memberikan perhatian dan kepeduliannya antara satu dengan yang lain.
 - 2) Memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk saling mengenal satu dengan lainnya, demikian juga dengan kepala sekolah, guru, dan karyawan.
 - 3) Menjadikan sebagian besar siswa agar tertarik untuk mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler.
 - 4) Memperkuat kegiatan keolahragaan.
 - 5) Memasang berbagai visualisasi atau famflet yang akan membantu mengembangkan budaya empat pilar ke dalam nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan yang positif.
 - 6) Menekankan setiap kelas untuk memberikan sumbangannya yang positif dan bermanfaat bagi pengembangan budaya empat pilar kebangsaan di sekolah.
- d. **Keempat:** pihak sekolah dapat menciptakan komunitas moral dengan cara;
- 1) Menyediakan waktu dan dukungan kepada para guru untuk berkeja bersama-sama dalam menyusun pembelajaran yang bermuatan budaya empat pilar.
 - 2) Melibatkan para karyawan dalam pengambilan keputusan terkait budaya empat pilar kebangsaan di sekolah.

e. **Kelima:** Pihak sekolah menekankan pentingnya budaya empat pilar kebangsaan dalam nilai-nilai moral dengan cara;

- 1) Melunakkan tekanan-tekanan akademik sehingga para guru tidak mengabaikan perkembangan sosial dan moral para siswa.
- 2) Mendorong para guru untuk senantiasa bekerja atas dasar budaya empat pilar dalam sebuah nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan yang positif.

Program pelaksanaan budaya empat pilar diorganisasikan dan diterapkan di lingkungan sekolah dengan menggunakan strategi pemodelan (*modeling*), pengajaran (*teaching*), dan penguatan lingkungan (*reinforcing*). Pembudayaan dan penanaman karakter ini secara terus-menerus mensyaratkan proses pemodelan, pengajaran, dan penguatan lingkungan atas karakter yang baik. Tim Budaya Sekolah dan Karakter harus menjalin kerjasama secara interkoneksi dengan semua komponen sekolah dan menyatukan langkah mereka untuk membangun lingkungan sekolah yang berbudaya empat pilar kebangsaan.

Ketika semua komponen sekolah dilibatkan dalam pembudayaan empat pilar, ini berarti bahwa nilai, norma, kebiasaan-kebiasaan yang sudah diprioritaskan harus dimodelkan oleh semua warga sekolah (kepala sekolah, guru, siswa, dan karyawan), diintegrasikan oleh setiap guru ke dalam mata pelajaran, dan dikuatkan oleh penataan lingkungan sekolah. Sementara itu, orang tua/wali siswa juga harus memperhatikan perkembangan karakter anak-anak mereka ketika berada di rumah; demikian juga dengan proyek-proyek sosial yang disiapkan oleh komite sekolah dan masyarakat.



Gambar 6.2: Strategi Pembudayaan Empat Pilar kebangsaan di Sekolah

Berikut penjelasan strategi pemodelan untuk membudayakan empat pilar kebangsaan:

1. Pemodelan (*Modeling*)

a. Sekolah:

Tim Budaya Sekolah dan Karakter akan membantu kepala sekolah, para guru, dan karyawan untuk memahami atau mengerti arti penting pemodelan yang sehat bagi para siswa mereka. Pihak sekolah harus memahami betul

bahwa empat pilar kebangsaan yang akan dibudayakan dalam lingkungan sekolah terdiri atas nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan karakter yang akan diberikan kepada siswa harus dimulai dari kepala sekolah, guru, dan karyawan bersikap di antara mereka sendiri, memperlakukan dan melayani orang tua/wali siswa, dan tentu saja ketika mereka memperlakukan dan melayani para siswa itu sendiri.

b. Keluarga:

Orang tua memainkan peran yang sangat penting sebagai model bagi anak-anak mereka. Tim Budaya Sekolah dan Karakter dapat membantu para orang tua dengan menerbitkan berita berkala yang di dalamnya memuat kajian tentang empat pilar kebangsaan dan nilai-nilai yang akan diterapkan, bagaimana menjadi orang tua yang baik atau berisi konsultasi orang tua dengan tim bimbingan dan koseling.

c. Masyarakat:

Masyarakat juga memainkan peran yang tak kalah pentingnya sebagai contoh atau model yang dapat menjadi pendorong keberhasilan para siswa dalam membudayakan empat pilar ke dalam nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan karakter yang baik. Tokoh-tokoh panutan tertentu dapat dijadikan model bagi para siswa dengan dihadirkan di sekolah untuk melakukan sharing atas kehidupan dan keberhasilan mereka. Para siswa pun dapat diminta untuk menemui atau melakukan wawancara ringan dengan tokoh-tokoh

tersebut dan meminta mereka menceritakan hubungan antara nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan karakter yang baik dan keberhasilan dalam kehidupan mereka.

2. Pengajaran (*Teaching*)

Pihak sekolah bersama-sama dengan keluarga dan masyarakat harus memberikan perhatian yang serius terhadap pentingnya pembelajaran budaya empat pilar ke dalam nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan karakter bagi para siswa. Semua kegiatan harus diorganisasikan secara tepat sesuai dengan karakter yang sedang dibudayakan. Hendaknya ada bahasa yang sama yang digunakan pihak sekolah dan orang tua. Program tersebut dapat secara mudah diterapkan baik di sekolah maupun di rumah, yaitu sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma, dan kebiasaan karakter yang sudah menjadi prioritas.

a. Sekolah:

Kurikulum yang diterapkan di sekolah dalam mewujudkan budaya empat pilar kebangsaan ke dalam mata pelajaran, berbagai kegiatan, dan proyek sosial. Dalam hal ini guru secara aktif mengajarkan kepada para siswa mengenai budaya empat pilar yang menjadi prioritas sekolah dengan cara mengintegrasikannya ke dalam setiap mata pelajaran.

b. Keluarga:

Lingkungan pembelajaran yang utama bagi anak-anak adalah di rumah. Para orang tua dapat mendiskusikan tentang empat pilar kebangsaan ke dalam nilai, norma, kebiasaan-kebiasaan karakter

yang menjadi prioritas sekolah dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di rumah mereka masing-masing. Untuk membantu para orang tua, Tim Budaya Sekolah dan Karakter beserta sekolah dapat menyusun kegiatan periodik yang dapat membantu mereka seperti kegiatan konsultasi kelas atau kelas orang tua.

c. Masyarakat:

Tim Budaya Sekolah dan Karakter dapat mengajarkan nilai-nilai, norma-norma, dan kebiasaan-kebiasaan karakter yang baik terkait empat pilar kebangsaan kepada para siswa dengan cara menghadirkan tokoh-tokoh idola ke sekolah. Selain itu, tim pun dapat menyiapkan atau membuat proyek untuk melakukan kunjungan sosial ke tempat-tempat tertentu yang sesuai dengan nilai, norma, kebiasaan-kebiasaan karakter dalam empat pilar kebangsaan yang menjadi prioritas. Untuk hal yang kedua para siswa dapat diajak untuk mengunjungi Tempat bersejarah, Taman Makam Pahlawan, Museum atau berkunjung ke tempat wisata.

3. Penguatan Lingkungan (*Reinforcing*)

Agar pembudayaan empat pilar kebangsaan ini dapat berkembang dan berjalan dengan efektif, harus didukung dengan adanya penguatan yang konsisten. Penguatan yang konsisten ini antara lain dengan dilakukannya komunikasi yang terus-menerus berkaitan dengan nilai, norma, kebiasaan-kebiasaan dalam empat pilar yang telah menjadi prioritas dan

juga memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menerapkan nilai-nilai tersebut.

a. Sekolah:

Penguatan terhadap kebudayaan empat pilar kebangsaan yang baik di sekolah dapat dilakukan dengan beberapa cara. Kebijakan mengenai aturan atau tata tertib sekolah adalah menjadi acuan pokok dalam kebudayaan empat pilar di sekolah. Penguatan yang lain dapat berupa pembiasaan-pembiasaan yang diprogramkan pihak sekolah seperti pembiasaan tegur, salam, dan sapa, serta jabat tangan, shalat dhuha (bagi umat Islam), berdoa dalam mengawali dan mengakhiri suatu kegiatan, upacara bendera, upacara hari bersejarah, dan lain sebagainya.

Penguatan kebudayaan empat pilar dapat juga berupa visualisasi atau pemasangan pamflet-pamflet yang bermuatan nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan karakter, majalah dinding, dan pemberian penghargaan kepada para guru, siswa, atau kelas tertentu yang memperlihatkan prestasi yang berhubungan dengan empat pilar kebangsaan yang menjadi prioritas. Tidak kalah pentingnya untuk mendukung kebudayaan empat pilar kebangsaan yang baik adalah penataan fisik lingkungan sekolah, seperti pertamanan dan lingkungan yang bersih dan sehat dan mengandung unsur empat pilar kebangsaan.

b. Keluarga:

Penguatan kebudayaan empat pilar yang baik dilakukan juga dalam lingkungan keluarga. Kebudayaan ini dapat dilakukan dengan

memberikan bahan bacaan ringan kepada anak-anak yang dapat menuntun terbentuknya karakter yang sesuai dengan nilai-nilai empat pilar. Hal-hal lain yang dapat dilakukan keluarga adalah dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan positif sesuai dengan nilai-nilai empat pilar yang menjadi prioritas sekolah. Demikian juga dengan melakukan penataan tata ruang di lingkungan keluarga.

c. Masyarakat:

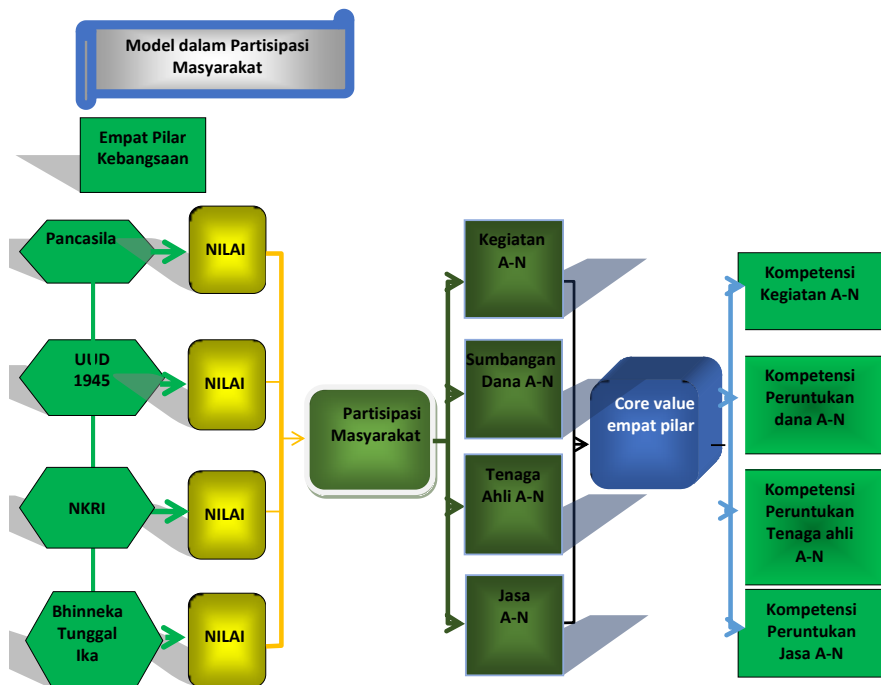
Penguatan kebudayaan empat pilar ini dapat dilakukan dengan meminta para siswa untuk menemui tokoh-tokoh masyarakat setempat atau para pejuang. Mereka dapat melakukan wawancara ringan atau diminta untuk menceritakan keteladanan dan keberhasilan seorang tokoh. Selain menemui dan menceritakan sosok tokoh masyarakat, proyek sosial yang ditugaskan kepada para siswa akan memberikan kesempatan kepada mereka secara aktif untuk menerapkan nilai-nilai dalam empat pilar yang sekaligus merupakan sumbangan mereka terhadap masyarakat

BAB VII

PENGEMBANGAN EMPAT PILAR KEBANGSAAN DALAM PARTISIPASI MASYARAKAT

A. Deskripsi Model Pendekatan Empat Pilar Kebangsaan dalam Partisipasi Masyarakat

Pendekatan integratif dan komprehensif dalam model pelaksanaan pembudayaan empat pilar kebangsaan dalam partisipasi masyarakat dilakukan secara terencana dengan baik. Pengintegrasian pendekatan empat pilar kedalam partisipasi masyarakat di atas dituangkan ke dalam gambar 7.1 sebagai berikut.



Gambar 7.1
Pendekatan Empat Pilar Kebangsaan dalam Partisipasi Masyarakat

B. Langkah-langkah Pengembangan Empat Pilar Kebangsaan dalam Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan gambar 7.1, model pendekatan empat pilar kebangsaan dilakukan secara integratif ke dalam sebuah bentuk partisipasi masyarakat. Kesuksesan proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat dalam setiap prosesnya. Pembudayaan empat pilar kebangsaan melalui partisipasi masyarakat bisa dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Empat pilar kebangsaan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika memiliki nilai-nilai yang harus dijabarkan masing-masing.
2. Nilai-nilai dalam empat pilar kebangsaan ini akan dipaparkan dan disosialisasikan kepada masyarakat dengan mengundang komite sekolah, wali murid, dan tokoh masyarakat sekitar sekolah dalam sebuah rapat sehingga semua pihak yang berkompeten bisa terlibat langsung menyelesaikan program ini.
3. Partisipasi masyarakat ini bisa dilakukan dengan meminta masyarakat untuk menyumbangkan ide dan pemikirannya dalam bentuk ide mengenai kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk membudayakan empat pilar kebangsaan, menyumbangkan dana untuk kegiatan yang disetujui, menyediakan tenaga ahli untuk kegiatan yang disetujui untuk dilaksanakan serta menyediakan Jasa yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tersebut.
4. Setelah disepakati bersama bentuk kegiatan apa yang akan diselenggarakan, maka masyarakat bersama-sama sekolah akan menentukan nilai inti (*core value*)

apa dari nilai empat pilar kebangsaan yang akan diintegrasikan ke dalam kegiatan tersebut.

5. Nilai inti (*core value*) ini nantinya harus tercermin dalam berbagai kompetensi kegiatan yang telah direncanakan bersama masyarakat, tercermin dalam dana, tenaga ahli dan jasa masyarakat untuk menyukseskan kegiatan.

C. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembudayaan empat pilar kebangsaan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, diantaranya:

1. Partisipasi finansial yang diwujudkan berupa dukungan dana sesuai dengan kekuatan dan kemampuan masyarakat. Termasuk juga orang tua secara kolektif dapat mendukung dana yang diperlukan sekolah, yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan untuk mewujudkan budaya empat pilar. Selain itu, lembaga bisnis dan industri diharapkan dapat menyisihkan anggaran untuk pemberian bantuan dan dukungannya.
2. Partisipasi material yang diwujudkan dengan sumbangan bahan-bahan yang berkenaan dengan material bangunan, untuk penyempurnaan bangunan ruang dan tempat yang mendukung kegiatan pembudayaan empat pilar kebangsaan sehingga dapat berjalan dengan baik. Demikian juga masyarakat mendukung terciptanya lingkungan fisik yang kondusif untuk kegiatan pembudayaan empat pilar kebangsaan tersebut.
3. Partisipasi akademik yang ditunjukkan dengan kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan akademik yang lebih berkualitas dengan

menanamkan nilai empat pilar kebangsaan dalam pelajaran. Dukungan dapat diwujudkan dengan dukungan orang tua dan masyarakat untuk mengawasi dan membimbing belajar anak di rumah. Selain itu banyak lembaga-lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan yang dapat memberikan kesempatan untuk praktek atau magang, mengunjungi tempat bersejarah, mendatangkan tokoh nasional dan tokoh pejuang kemerdekaan dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk memberikan wawasan secara nyata kepada peserta didik.

4. Partisipasi kultural yang diwujudkan dengan perhatian masyarakat terhadap terpeliharanya nilai empat pilar kebangsaan secara kultural dan moral yang terdapat di lingkungan sekitar sekolah sehingga sekolah mampu menyesuaikan diri dengan budaya setempat.
5. Partisipasi evaluatif, yang diwujudkan dengan keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengendalian dan kontrol terhadap penyelenggaraan pembudayaan nilai-nilai dalam empat pilar kebangsaan, sehingga masyarakat dapat memberikan umpan balik dan penilaian terhadap kinerja lembaga pendidikan. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam penyusunan atau pemberi masukan dalam penyusunan kurikulum bagi sekolah. Agar kurikulum itu sesuai dengan kebutuhan siswa.

D. Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan

Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan bisa dilakukan oleh sekolah dan lembaga pendidikan dengan melakukan beberapa hal berikut agar

partisipasi masyarakat dalam pembudayaan empat pilar kebangsaan semakin baik, antara lain:

1. **Menjalin Komunikasi yang Efektif dengan Orang Tua dan Masyarakat**

Partisipasi orang tua dan masyarakat akan tumbuh jika orang tua dan masyarakat juga merasakan manfaat dari keikutsertaannya dalam program pembudayaan empat pilar kebangsaan. Manfaat dapat diartikan luas, termasuk rasa diperhatikan dan rasa puas karena dapat menyumbangkan kemampuannya bagi kepentingan sekolah. Jadi prinsip menumbuhkan hubungan dengan masyarakat adalah saling memberikan kepuasan. Salah satu jalan penting untuk membina hubungan dengan masyarakat adalah menetapkan komunikasi yang efektif.

Kemampuan komunikasi yang efektif merupakan salah satu aspek yang mendasar dari kualitas seorang humas sekolah. Humas sekolah bukan hanya berperan sebagai bagian perencanaan kegiatan sekolah serta pencitraan saja tetapi semestinya juga dapat memberikan arah positif bagi tercapainya misi sekolah sekaligus bisa menginspirasi aparatur sekolah untuk melaksanakan secara optimal. Oleh sebab itu kehumasan di sekolah memiliki peran yang penting dalam menjalin komunikasi yang efektif dengan masyarakat.

Salah satu fungsi humas adalah menjalin komunikasi dan relasi dengan public-publik organisasi. Dampak dari terwujudnya fungsi ini adalah pencapaian tujuan organisasi. Sehingga peran seorang *public relations* disekolah menjadi sangat penting. *Public relations* berperan aktif dalam komunikasi, yaitu:

- a) *Public relations* berperan sebagai teknisi komunikasi untuk organisasi. di mana seorang humas diharuskan memahami keahlian komunikasi dan jurnalistik karena ia akan ditugaskan untuk menulis news release, mengembangkan isi web, menangani kontak media, dan juga berhubungan dengan banyak public di sebuah instansi.
- b) *Public relations* berperan sebagai fasilitator komunikasi. Public relations sebagai pendengar yang peka dan sebagai perantara komunikasi. Fasilitator bekerja sebagai penghubung antara organisasi dengan publik. Komunikasi akan selalu dijaga supaya berjalan dua arah dan memfasilitasi komunikasi tersebut dengan menyingkirkan segala rintangan sambil terus membuka jalur komunikasi. Tujuannya adalah memberi informasi yang dibutuhkan baik oleh instansi, dalam hal ini manajemen, maupun publik untuk membuat suatu keputusan atau pandangan demi kepentingan bersama.

Komunikasi efektif dalam kaitannya dengan hubungan sekolah dan masyarakat memiliki manfaat, yaitu:

- a) Membantu membangun tim. Membutuhkan seorang pemimpin yang mampu dengan baik untuk berkomunikasi kepada setiap individu. Sehingga dengan menghilangkan rasa takut dan menanamkan kepercayaan dalam kemampuan mereka melalui komunikasi langsung seorang pemimpin dapat menciptakan sebuah tim yang dapat unggul. Hal ini dalam hubungan sekolah dengan masyarakat dapat membantu agar

hubungan sekolah dan pihak luar dapat tetap terjalin dengan baik.

- b) Menghindari kesalahpahaman. Sehingga dengan komunikasi yang diatur, banyak kesalahpahaman dan miskomunikasi yang dapat diselesaikan secara damai. Apabila ada permasalahan yang ada di sekolah agar bisa tetap dikomunikasikan dengan baik, sehingga dapat meminimalisasi efek negative sekolah di mata masyarakat.
- c) Membangun hubungan kerjasama antara sekolah dan pihak masyarakat, sehingga dengan adanya komunikasi yang berjalan baik satu sama lain, sekolah dan masyarakat dapat saling bekerja sama.

Komunikasi antara orang dengan orang tidak selalu tergantung pada teknologi, akan tetapi tergantung dari kekuatan dalam diri orang itu sendiri. Proses yang berjalan dari komunikator yang menyampaikan pesan (*message*) melalui jalur tertentu (*medium*), kemudian ditangkap oleh penerima (*receiver*) dan bila memungkinkan menjadi umpan balik (*feedback*) kepada komunikator. Guru membangun kerjasama antara sekolah dan masyarakat juga melalui tahap-tahap komunikasi agar komunikasi dapat berjalan dengan efektif dan berkesinambungan.

2. Melibatkan Masyarakat dan Orang Tua dalam Program Budaya Empat Pilar.

Disini sekolah harus memperkenalkan program dan kegiatan sekolah untuk membudayakan empat pilar kebangsaan kepada masyarakat, agar masyarakat lebih mengenal dan dapat membantu program tersebut. Selain itu juga, sekolah perlu memberi tahu masyarakat

tentang program unggulan sekolah terkait pembudayaan empat pilar agar menarik minat masyarakat.

Pihak sekolah dan keluarga peserta didik perlu musyawarahs bersama agar orang tua peserta didik dapat berperan dan terlibat aktif dalam komunitas sekolah. Proses dan dampak pelibatan keluarga di sekolah harus direncanakan secara sistematis, dengan melakukan musyawarah dengan keluarga peserta didik. Ada beberapa pelibatan keluarga di sekolah yang dapat diterapkan.

- a) Pertama, dengan melakukan pelatihan atau sosialisasi pendidikan keluarga kepada orang tua peserta didik. Pihak sekolah mengadakan pelatihan dan sosialisasi cara positif dalam mendidik anak, dengan menghadirkan nara sumber yang berkompeten dalam pendidikan keluarga.
- b) Kedua, dengan membentuk paguyuban kelas. Paguyuban kelas adalah perkumpulan orang tua peserta didik dalam satu kelas, jadi semua orang tua peserta didik dalam satu kelas ada juga perkumpulannya dan bisa dipilih siapa yang menjadi ketua paguyuban kelas itu.

3. Mengundang masyarakat dalam rapat tahunan sekolah.

Masyarakat perlu terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pembudayaan empat pilar kebangsaan di sekolah. Dalam hal ini tentu sekolah harus transparan dalam hal kurikulum pembelajaran sekolah dan juga tentang biaya penyelenggaraan sekolah. Hal ini dimaksudkan agar orang tua tidak hanya menerima informasi dari

sekolah. Tetapi masyarakat juga bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan peserta didik agar program tersebut dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, sekolah juga dapat melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkenaan dengan kebutuhan operasional maupun non operasional sekolah.

Di forum ini masyarakat dan sekolah saling bertukar pikiran, mengeluarkan ide atau gagasan dan juga menyampaikan permasalahan yang dihadapi baik oleh orang tua murid ataupun sekolah. Jadi sekolah dan masyarakat dapat saling bahu membahu dalam mengembangkan budaya empat pilar kebangsaan demi tercapainya tujuan pendidikan nasional yang berkarakter.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, A., 2006. *Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia: Perspektif Multikulturalisme. Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila "Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas. Brighten Institute, Bogor.*
- Borba, Michele. 2008. *Membangun kecerdasan moral: Tujuh kebajikan utama agar anak bermoral tinggi.* Terj. oleh Lina Yusuf. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Christensen, B.J., 2018. *Globalization, Globalization.* doi:10.1007/978-3-662-49502-5_1
- Cohen, J., Uphoff, N., 1980. *Participation Place in Rural Deveopment.* J. World Dev. 80.
- De Roche, E.F., 1985. *How School Administrators Solve Problem.* Prentice Hill, New Jersey.
- Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila, Yayasan Cipta Lokia Caraka, Jakarta Kemendiknas. (2010). *Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama.* Jakarta: Kemendiknas
- Franz Magnis – Suseno, *Etika Politik*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Kaelan, 2009. *Filasafat Pancasila.* Paradigma, Yogyakarta.
- Kevin Ryan & Karen E. Bohlin. (1999). *Building character in schools: Practical ways to bring moral instruction to life.* San Francisco: Jossey Bass.
- Koesoema A, Doni. (2007). *Pendidikan karakter: Strategi mendidik anak di zaman global.* Jakarta: Grasindo. Cet. I.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Nasikun, 2012. *Sistem Sosial Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Olivia, Peter, F.. (1992). *Developing the Curriculum*. New York: Harper Collins Publishers.
- Peterson, K.D., Deal, T.E., 2009. *The Shaping School Culture Fieldbook*, Second. ed. San Fransisco.
- Puspita, R., Arif, B., 2014. *Implementasi Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta*.
- Sahidu, A., 1998. *Partisipasi masyarakat tani pengguna lahan sawah dalam pembangunan pertanian di daerah Lombok, NTB*. IPB.
- Short, Greer, 1997. *Defining the School's Culture*. Ward.qxd pg 1.
- Steger, M., 2003. *Globalization: A Very Short Introduction*. Oxford University Press, New York.
- Stolp, S., Smith, S., 1994. *School Culture and Klimate: The Role of The Leader*. OSSC Bull.
- Sujamto, *Revitalisasi Budaya Jawa*, Effhar & Dahara Prize, Semarang.
- Suparno, Paul, dkk. 2002. *Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah, Suatu Tinjauan Umum*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Suseno, Franz Magnis. (1989). *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Winarno, 2007. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Bumi Aksara, Jakarta.